

**POTENSI WAKAF PRODUKTIF
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus pada Mesjid-Mesjid Kecamatan Sukajadi Pekanbaru)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Ekonomi Islam (S.E.I) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum



OLEH:

MARZUKI
10725000046

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU - 2011**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“POTENSI WAKAF PRODUKTIF MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada mesjid-mesjid Kec. Sukajadi)”** potensi wakaf produktif merupakan suatu kekuatan atau kemampuan yang ada pada wakaf yang masih belum diberdayakan untuk menambah nilai manfaat dari harta wakaf tersebut.

Latar belakang Penulis memilih judul ini karena ingin mengetahui potensi wakaf produktif menurut perspektif ekonomi Islam. Dimana wakaf selama ini hanya digunakan untuk fasilitas Ibadah (mesjid), Madrasah, pemakaman, dan lain sebagainya yang merupakan bagian dari wakaf langsung. Padahal disamping itu juga harta wakaf yang lainnya juga mempunyai kemampuan yang terpendam untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu dengan menjadikan wakaf tersebut atau sisa tanah wakaf tersebut sebagai wakaf yang produktif (menghasilkan) yang hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan di mesjid-mesjid Kecamatan Sukajadi yang terdiri dari mesjid Al-Falah II jalan Murai, Baitul Mukminin Jl. Ababil, Al-Khairat Jl. Mangga, dan Dakwah Jl. Teratai.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 4 mesjid terutama yang menjalankan wakaf produktif. Penulis tidak menggunakan *teknik sampling* melainkan dengan sensus artinya semua yang tercatat sebagai populasi penulis jadikan sebagai responden. Untuk pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pengurus mesjid, dan para nazhir yang ada di mesjid tempat penulis lakukan penelitian, sedangkan data Sekunder dari penelitian ini diperoleh dari literatur – literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Sedangkan analisa data yang penulis gunakan adalah Deskriptif Kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan dalam penelitian ini.

Potensi wakaf produktif di Mesjid-mesjid kecamatan Sukajadi dapat berupa Kos-kosan, Rumah kontrakan dan sewaan dan berupa ruko yang dikontrakan dan hanya sedikit yang baru menjalankan terutama mesjid Al-Falah II, Al-Khairat, Baitul Mukminin, dan Dakwah, sedangkan mesjid lainnya mempunyai dalam bentuk wakaf langsung.

Pelaksanaan wakaf produktif di mesjid-mesjid Kecamatan Sukajadi masih bersifat sederhana dan tradisional. Hal ini dapat dilihat dari harta wakaf produktif yang tumbuh dan berkembang di Mesjid-mesjid Kecamatan Sukajadi yang dikelola oleh nazhir berpegang teguh pada usaha yang kaku, kurang inovasi, dan merupakan pekerjaan sampingan yang bersifat sosial atau sukarela dan harta wakaf produktif yang tumbuh dan berkembang merupakan usaha yang sederhana dengan resiko kecil. Hukum bisnis berlaku dimana resiko kecil mendatangkan untung kecil dan resiko besar akan mendatangkan untung besar .

Tinjauan ekonomi Islam terhadap wakaf produktif di mesjid-mesjid Kecamatan Sukajadi sesuai dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam dan hasil dari wakaf tersebut belum menyentuh pada ekonomi masyarakat banyak.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii

BAB I :PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	13
A. Profil Mesjid Al- Falah II dan Potensinya.....	13
B. Profil Mesjid Baitul Mukminin dan Potensinya.....	14
C. Profil Mesjid Dakwah dan Potensinya.....	16
D. Profil Mesjid Al-Khairat dan Potensinya.....	17

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PERMASALAHAN.....	20
A. Pengertian.....	20
B. Dasar Hukum.....	26
C. Syarat dan Rukun dalam Konteks Fiqh Indonesia.....	29
D. Sejarah dan Perkembangan Wakaf di Indonwsia.....	32
E. Paradigma Wakaf Produktif.....	36
F. Potensi Wakaf Produktif di Indonesia.....	49

**BAB IV : POTENSI WAKAF PRODUKTIF MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM.....52**

- A. Potensi Wakaf Produktif di Mesjid-Mesjid Kecamatan Sukajadi.....52
- B. Pelaksanaan Wakaf Produktif di Mesjid-mesjid Kecamatan Sukajadi..62
- C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Wakaf Produktif di Mesjid-mesjid
Kecamatan Sukajadi.....71

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN76

- A. KESIMPULAN 76
- B. SARAN77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Undang – Undang Dasar 1945 BAB XI Pasal 33 ayat 3 Juga dijelaskan “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”¹. Sebagai warga Negara yang mayoritas kaum muslimin memiliki peran vital dalam meningkatkan ekonomi, misalnya dalam hal perwakafan.

Definisi wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional oleh seorang nazhir untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf².

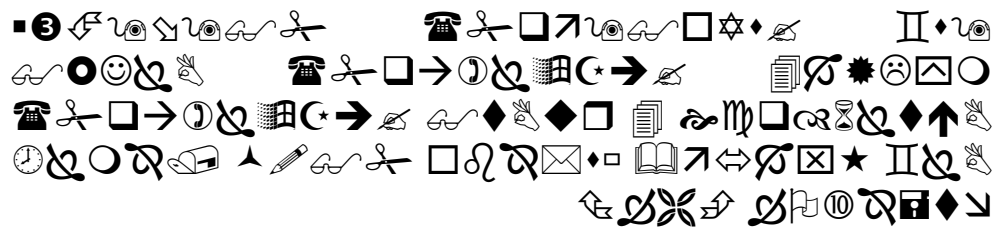
Di dalam kehidupan modern, manusia cenderung hidup secara individu yakni mementingkan kepentingan individu, sedangkan agama Islam mengajarkan kita tidak hanya untuk mementingkan kepentingan sendiri, namun juga kepentingan sosial dalam skripsi ini khususnya mengenai meningkatkan ekonomi masyarakat muslim.

Permasalahan wakaf juga diatur dalam agama Islam. Adapun yang menjadi dalil sebagai dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari :

¹ Undang-Undang Dasar tahun 1945.

² Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008) h, 15.

Ayat Al-qur'an, antara lain :



Artinya : “ Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran : 92)³.

Abu Thalhah, seorang sahabat setelah mendengar ayat diatas ingin mewakafkan hartanya yang sangat dicintainya, berupa kebun di Birha⁴.

Sunnah Rasulullah SAW.

أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
عنه من عمله , قة جارية, او علم ينتفع به,
صالح يدعو له ()

Dari Abu Hurairah ra, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : “ Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendo'akan orang tuanya” (HR. Muslim)⁵.

Adapun penafsiran صدقة جارية (*shodaqoh jariyah*) dalam sabda Rasulullah tersebut adalah dengan “wakaf”, bukan seperti wasiat memanfaatkan harta⁶.

³Depag, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT. Syamil Cipta Media, 2005), h. 62.

⁴Devi Megawati, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru, 2010), h. 39.

⁵ M. Nashiruddin Al-Abani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta : Gema Insani, 2005), h. 47.

⁶ Direktorat pemberdayaan wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Pruduktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta : Depag, 2007), h. 17-18.

Kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizing Allah⁷.

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 dan Undang – undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, tepatnya pada pasal 43 ayat (2) dibarengi dengan kata produktif⁸. Tentu saja ini merupakan terobosan yang cukup signifikan dalam dunia perwakafan, karena wakaf dapat dikelola secara produktif, sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak.

Aspek kemanfaatan zat (benda yang diwakafkan) menjadi esensi dari waktu itu sendiri. Sehingga dengan diaturnya benda wakaf tersebut diharapkan bisa menggerakkan seluruh potensi (kekuatan, kesanggupan, kemampuan⁹) wakaf untuk kesejahteraan masyarakat luas¹⁰.

Adanya kebiasaan masyarakat kita yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat sekitar, seperti kyai, ulama, ustadz, ajengan, dan lain-lain untuk mengelola harta wakaf sebagai nazhir. Orang yang ingin

⁷Ahmad Djunaidi, dkk, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta : Mumtaz Publishing, 2007) h. 47.

⁸DEPAG, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*.

⁹ Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Gita Media Press, 2006). h. 381.

¹⁰ Ahmad Djunaidi, *lot.cit*.

mewakafkan harta (wakif) tidak tahu persis kemampuan yang dimiliki oleh nazhir tersebut.

Dalam kenyataannya, banyak para nazhir wakaf tersebut tidak mempunyai kemampuan manajerial dalam pengelolaan tanah atau benda wakaf lainnya sehingga harta wakaf tidak banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Keyakinan yang mendarah dan mendaging bahwa wakaf harus diserahkan kepada seorang ulama, kyai, atau lainnya, sementara orang yang diserahi belum tentu mampu mengurus merupakan kendala yang cukup serius dalam rangka memberdayakan harta wakaf secara produktif di kemudian hari terutama para nazhir.

Dalam penelitian pendahuluan yang penulis lakukan di Kecamatan Sukajadi terdapat fakta bahwa :

1. Masyarakat muslim yang ada di Kecamatan Sukajadi terutama yang memiliki harta lebih, seperti, tanah, rumah susun, toko, dan lain-lain. Semua yang dimiliki tersebut mempunyai potensi untuk diwakafkan yang dikelola secara produktif oleh nazir yang dipercayainya sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi umat Islam dan lain sebagainya. Berikut ini adalah tabel wakaf yang telah resmi tercatat dan diberikan dari wakif kepada nazhir di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi.

Tabel 1.
Daftar Nama-Nama Wakif

NO	NAMA WAKIF	GUNA WAKAF
1	Ny. Sunarmi	Pemb. Masjid Ar-Rahman
2	H.Ali Akbar	Pemb. Masjid Khairun
3	Sari Dayang Hasanah	Umum
4	E.P Simatupang	Pemb. Musholla Zikir
5	Harun	Pemb. Musholla An-Nadwah
6	Edi Suwanto	Pemb. Musholla Taqwa
7	Paiso	Pemb. Musholla Asy-Syakirin
8	T.M, Ilyas	Pemb. Masjid Darul Arqam
9	Asni Syafi'i	Pemb. Musholla Babussalam
10	Umar Baint	Pemb. Masjid Dakwah
11	H.Sutan Jamaluddin	Pemb. Masjid Rahmat
12	H.Taharuddin	Pemb. Masjid Baitul Muttaqin
13	H,M,Sujak	Pemb. Masjid
14	Zahara	Pemb. Masjid
15	Karman	Pekarangan Masjid
16	H.Johan Anwar	Pemb. Musholla Nurul Amal
17	Soekoco	Masjid Baitul Mukminin
18	Thamrin Lubis	Pemb. Masjid Al-Mi'at
19	Jamal Ahmad	Pemb. Musholla Al-Iradah
20	Nurjambi	Pem. Musholla Miftahul Jannah
21	H.Basyiruddin	Pemb. Masjid Al-Furqon
22	Davis	Pemb. Masjid Baitul Makmur
23	Amiruddin	Pemb. Masjid Al-Jihad
24	Syarifuddin	Pemb. Musholla Al-Yakin
25	Nasrun	Pemb. Masjid Al-Ihsan
26	Badar Ali Majid	Pemb. Masjid Al-Mubin
27	Slamet Bin Rasmun	Pemb. Masjid Amal Ikhlas
28	Masrifah	Pemb. Masjid Surya
29	H.Amirudin	Pemb. Pekarangan Al-Jami'
30	Idris St. Sampono	Pemb. Masjid Al-Fitrah
31	Maridin Arbis	Peka. Masjid Fastabikul Khairat
32	Amras	Masjid Nurul Iman Khairat
33	Arifin	Pemb. Masjid Da'watul Islam
34	Ibrahim	Pemb Musholla Miftahul Jannah
35	Suparto	Pemb. Masjid Al-Mukarromah
36	M.Yunus	Pemb. Masjid Ar-Rahim
37	Darwis	Pemb. Musholla Da'wah

Sumber data : Dokumen KUA Kecamatan sukajadi

Berdasarkan data diatas mayoritas wakif mewakafkan hartanya untuk peribadatan.

2. Dalam pengamatan penulis dan hasil wawancara singkat dengan pengurus mesjid, penulis menemukan 4 mesjid yang mengelola wakaf produktif yaitu mesjid Al-Falah II Jalan Murai dalam bentuk kos-kosan yang terdiri dari 17 kamar, dimana hasilnya diperuntukkan untuk oprasional MDA, honor guru, biaya perawatan dan untuk nazhir. Al-Khairat Jalan Mangga memiliki 4 toko yang hasilnya dialokasikan untuk operasional MDA, mesjid dan kegiatan sosial. Baitul Mukminin Jalan Ababil memiliki 4 unit rumah sewaan yang hasilnya dialokasikan untuk operasional MDA, dan Dakwah Jalan Teratai memiliki 2 unit rumah kontrakan yang hasilnya untuk mesjid dan operasional MDA.
3. Pemahaman masyarakat muslim di Kecamatan Sukajadi untuk berwakaf terutama wakaf produktif sangatlah minim dan kurangnya pemahaman nazhir dalam mengelola wakaf produktif tersebut hal ini dapat dilihat dari usaha yang dijalankan hanya berupa rumah sewa dan kontrakan, kos-kosan, dan toko yang dikontrakkan dan hasilnyapun rata-rata untuk operasional MDA. Pada hal potensi dari harta wakaf tidaklah sedikit, apalagi Kecamatan Sukajadi terletak di pusat Kota Pekanbaru yang mempunyai potensi untuk pusat perbelanjaan, hotel/penginapan, rumah sakit, sarana pendidikan, apotik, bengkel mobil, warung, rumah makan, pom bensin, wartel dan warnet dan lain sebagainya kemudian hasil dari

pengembangan wakaf yang dikelola secara profesional dapat dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat dan bantuan atau pengembangan sarana prasarana ibadah.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka penulis mengajukan judul skripsi sebagai berikut
“POTENSI WAKAF PRODUKTIF MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus pada Mesjid-Mesjid Kecamatan Sukajadi Pekanbaru)”

B. Batasan Masalah

Untuk mendapat data yang lebih valid dan mendalam tentang inti permasalahan, maka pembahasan dalam tulisan ini lebih difokuskan pada Potensi Wakaf Produktif menurut perspektif Ekonomi Islam yang terjadi pada mesjid Al-Falah II Jalan Murai, Baitul Mukminin Jalan Ababil, Dakwah Jalan Teratai, Al-khairat Jalan Mangga dimulai dari penerimaan sampai penyaluran hasil wakaf tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana potensi wakaf produktif pada mesjid-mesjid yang ada di Kecamatan Sukajadi?
2. Bagaimana pelaksanaan wakaf produktif pada mesjid-mesjid kecamatan Sukajadi Pekanbaru?
3. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap wakaf produktif di Mesjid-mesjid Kecamatan Sukajadi?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui potensi wakaf produktif pada mesjid-mesjid yang ada di kecamatan sukajadi.
2. Mengetahui pelaksanaan wakaf produktif pada mesjid tersebut.
3. Mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap wakaf produktif.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan potensi wakaf produktif menurut perspektif ekonomi Islam.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi para pembaca, khususnya bagi penulis, umumnya bagi masyarakat dan mahasiswa lainnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* yaitu: adalah penelitian yang dilakukan dilapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada mesjid-mesjid yang mempunyai potensi wakaf produktif di Kecamatan Sukajadi Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini penulis lakukan dengan alasan bahwa waktu yang diperlukan tidak terlalu lama dan tidak menggunakan dana yang cukup besar. Kemudian daerah Sukajadi merupakan daerah yang cukup berpotensi untuk dikembangkan wakaf produktif karena daerahnya strategis, dan ekonomi masyarakatnya sejahtera.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus mesjid, pengelola wakaf tersebut (nazhir). Objek penelitian ini adalah potensi wakaf produktif menurut perspektif ekonomi Islam.

4. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus mesjid yang menjalankan wakaf produktif antara lain mesjid Al-Falah II berjumlah

26 orang, mesjid Al-Khairat berjumlah 45 orang, mesjid Baitul Mukminin berjumlah 48 orang dan mesjid Dakwah 29 orang, maka jumlah keseluruhannya adalah 148 orang. Dikarenakan jumlah pengurus yang begitu banyak dan tidak semua yang mengetahuinya, maka penulis menggunakan teknik *Porposif Sampling* dengan mengambil 10% dari populasi yaitu 14 orang dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pengurus – pengurus mesjid yang mengetahui tentang wakaf produktif.
2. Nazhir-nazhir (pengelola) harta wakaf produktif.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sampel yang dijadikan responden penelitian yang terdiri dari pengurus dan pengelola wakaf (nazhir).
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan jalan menelaah dari buku-buku penunjang kemudian mencatat data sekunder yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

6. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengamati dan meninjau secara langsung pada objek yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk lebih mengetahui keadaan yang sesungguhnya dilapangan.

- b. Wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dalam hal ini kepada pengurus mesjid, dan pengelola (nazhir).
- c. Studi Dokumentasi yaitu suatu cara yang penulis lakukan untuk mengumpulkan data tertulis oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, pengurus mesjid, pendapat dan teori yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.

7. Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu mengungkap data-data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian menguraikannya sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus, kemudian data-data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik secara umum.

8. Metode Analisa Data

Setelah memperoleh data-data, maka penulis analisa dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yaitu dengan jalan mengklasifikasikan data – data ke dalam kategori persamaan jenis data itu, kemudian diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Untuk supaya mudah pembaca memahami isi penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN, Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Metode Penelitian (Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Penulisan, Metode Analisa Data), dan Sistematika Penulisan.

BAB II :GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, Profil mesjid yang terdiri dari sejarah berdirinya, kegiatan yang dilaksanakan, dan potensi wakaf produktif yang ada di mesjid tersebut.

BAB III :TINJAUAN PUSTAKA Pengertian (Potensi, Wakaf, Produktif, Wakaf Produktif), Dasar Hukum, Nazhir Wakaf Produktif, Paradigma Wakaf Produktif, Potensi Wakaf Produktif di Indonesia.

BAB IV :POTENSI WAKAF PRODUKTIF MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM yang berisikan potensi wakaf produktif, pelaksanaan wakaf produktif pada mesjid-mesjid tersebut dan pandangan ekonomi Islam terhadap wakaf produktif.

BAB V: PENUTUP, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Mesjid Al-Falah II dan Potensinya¹.

Asal mula berdirinya mesjid Alfalah II yang berlokasi jalan Murai Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi bukanlah berasal langsung utuh menjadi mesjid melainkan berasal dari sebuah surau/musholla yang berukuran 4 x 4 meter tepatnya pada tahun 1970-an dimana penduduk waktu itu sangatlah jarang. Sedangkan jama'ahnya berasal dari satu wilayah yang cukup luas, dimana dahulunya dalam satu wilayah RK sebelum dipecah menjadi tiga RW yang terdiri dari RW 1, RW 2, dan RW 3 hingga pada saat sekarang ini.

Bergantinya hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun jumlah pendudukpun mulai bertambah maka jama'ahpun mulai meningkat. Pada tahun 1975 maka pengurus berinisiatif untuk memperbesar surau/mushola tersebut dengan ukuran 12 x 12 meter dan menggantikan namanya menjadi Al-Falah II pada tahun 1986 sampai tahun 2000. Pada tahun 2001 jumlah jama'ah semakin meningkat maka penguruspun berinisiatif untuk memperbesar mesjid tersebut dengan ukuran 20 x 20 meter dengan menghabiskan dana 1,2 Miliar yang dananya bersumber dari wakaf para jama'ah dan bantuan dari pemerintah sampai pada saat sekarang ini.

¹ Wawancara penulis dengan Bapak Suleman (wakil ketua mesjid Al-falah II) di Jl. Elang No. 18 tanggal 29 Maret 2011, jam 16.30-17.00.

Disamping mesjid juga dibangun sebuah rumah untuk imam mesjid serta bangunan 4 lantai dimana lantai 1 dan 2 dipergunakan untuk kegiatan MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah), dan lantai 3 dan 4 adalah kos-kosan sehingga berpotensi untuk diproduktifkan.

Adapun yang menjadi rutinitas dari kegiatan mesjid ini selain dari tempat ibadah ialah :

- a. Wirid kaum Ibu-Ibu yang dilaksanakan setiap kamis sore (ba'da ashar)
- b. Wirid Umum yang dilaksanakan setiap Jum'at malam
- c. Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
- d. Untuk didikan shubuh anak MDA setiap subuh ahad, dan
- e. Juga dilaksanakan pelatihan seni baca Al-qur'an.

B. Profil Mesjid Baitul Mukminin dan Potensinya².

Mesjid Baitul Mukminin yang terletak di jalan Ababil asal mulanya berasal dari tanah wakaf oleh Bapak H. Karnawi yang dibangun diatasnya sebuah surau yang bernama Surau Baitul Mukminin dengan ukuran 10 x 12 m tepatnya pada tahun 1960-an. Pada tahun 1986 diperluaslah tanah tersebut dengan membelinya kewarga dimana sumber dananya berasal dari swadaya masyarakat, sehingga tanah tersebut keseluruhannya dalam satu sertifikat seluas 1.148 m². Kemudian surau tersebut diganti dengan nama mesjid Baitul Mukminin. Pada tahun 1989 diperbesarlah mesjid tersebut dengan ukuran 20x20 m yang berlantai 2.

² Wawancara penulis dengan Bapak H. Hadiimi, SH, (Koordinator Seksi Dakwah dan sebagai Nazhir) di Jl. Ababil tanggal 17 April 2011, jam 20.00-20.30 WIB.

Selain dari mesjid, nazhir mesjid Baitul Mukminin memiliki tanah wakaf yang berasal dari pengurus surau majelis zikir, karena tidak dipergunakan lagi dan dikhawatirkan akan hilang manfaat wakaf tersebut. Maka, diserahkan kepada nazhir Mesjid Baitul Mukminin untuk mengelolanya. Ukuran tanah tersebut 341 m² yang diperuntukkan untuk MDA Baitul Mukminin sampai tahun 2008. Mengingat jumlah murid yang begitu ramai dan jauhnya mesjid dari MDA, maka pengurus berinisiatif untuk memindahkan MDA tersebut disamping mesjid yang terdiri dari 3 lantai, lantai 1 dan 2 sudah siap dan lantai 3 dalam proses pembangunan.

Karena MDA tersebut telah dipindahkan, maka tempat MDA lama tersebut diperuntukkan untuk membangun rumah kontrakan yang terdiri dari 4 unit rumah. Rumah inilah yang mempunyai nilai potensi untuk diproduktifkan.

Adapun yang menjadi rutinitas dari kegiatan mesjid ini selain dari tempat ibadah ialah :

- a. Wirid kaum Ibu-Ibu yang dilaksanakan setiap Jum'at sore (ba'da ashar)
- b. Wirid Umum yang dilaksanakan setiap Sabtu malam
- c. Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
- d. Untuk didikan shubuh anak MDA setiap subuh ahad.

C. Profil Mesjid Dakwah dan Potensinya³.

Asal mulanya mesjid dakwah yang berlokasi di jalan Teratai berasal dari sebuah musholla yang berukuran 8 x 12 meter tepatnya pada tahun 1956, kemudian mengingat jumlah jama'ah yang semakin meningkat sehingga diperlukan perluasan ukuran musholla tersebut, maka penguruspun memperluas musholla tersebut dengan ukuran 10 x 17 meter.

Kemudian semakin meningkatnya jumlah penduduk dan jama'ah, apalagi mesjid tersebut berlokasi dekat dengan pusat kota dan perbelanjaan yaitu sebuah pasar kodim, tetapi mesjid tersebut berada didalam gang sehingga jama'ah yang membawa kendaraan roda empat (mobil) sulit untuk masuk karena jalan menuju ke mesjid berupa gang diantara dua unit rumah. Tak lama kemudian terdengarlah kabar bahwa orang yang mempunyai rumah tersebut berkeinginan untuk menjualnya. Sehingga pengurus dan jama'ah mesjid dakwah menyepakati untuk membeli 3 unit rumah yang berada disekitar mesjid tersebut, 2 unit yang terletak diantara gang, dan yang satu lagi di belakang mesjid. Berkat hasil dari swadaya masyarakat yang mewakafkan hartanya berupa uang tunai, maka rumah tersebut menjadi milik mesjid Dakwah.

Mengingat rumah tersebut telah dimiliki oleh mesjid penguruspun berinisiatif untuk memperbesar mesjid tersebut dengan ukuran 13 x 20 meter dengan lantai 2, dimana lantai pertama dijadikan tempat ibadah sedangkan

³ Wawancara penulis dengan Bapak H. Martinis, (ketua mesjid Dakwah) di Jl. Teratai tanggal 31 Maret 2011, jam 10.30-11.15.

lantai kedua dijadikan sebagai tempat MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah) yang dikepalai oleh Arwin St. Saidi sampai pada saat sekarang ini.

Disamping itu, mesjid dakwah tersebut mempunyai harta wakaf selain dari tanah yaitu berupa rumah kontrakan yang berjumlah 3 buah rumah, namun satu rumah dihancurkan untuk pelebaran mesjid tersebut, sehingga mesjid tersebut mempunyai 2 unit rumah kontrakan yang berpotensi untuk diproduktifkan.

Adapun yang menjadi kegiatan rutinitas mesjid dakwah adalah sebagai berikut ;

- a. Sebagai tempat Ibadah (Sholat Fardhu)
- b. Wirid Umum pada malam Selasa dan malam Sabtu setiap minggunya.
- c. Wirid Ibu-ibu pada hari Rabu sore.
- d. Peringatan PHBI, dan
- e. Kegiatan Didikan subuh anak – anak MDA.

D. Profil Mesjid Al-Khairat dan Potensinya⁴.

Mesjid Al-khairat merupakan mesjid yang satu-satunya dibawah naungan Yayasan dengan nama Amal Al-Khairat dan mesjid Rayanya Kecamatan Sukajadi yang terletak di Jalan Mangga. Mesjid ini berawal dari satu mesjid yang mempunyai ukuran kecil tepatnya pada tahun 1990-an sehingga pengurus dan masyarakat bersepakat untuk memindahkannya di samping kanan tanah wakaf. Tanah tersebut dibeli dari pengumpulan dana berupa

⁴ Wawancara penulis dengan Bapak H. Ise Pasaribu, (ketua 1 mesjid Al-khairat) di Jl. Mangga tanggal 2 April 2011, jam 09.30-10.00.

wakaf bergerak (uang) dengan pertimbangan mesjid dapat dibangun lebih luas lagi yang terdiri dari dua lantai. Lantai pertama dijadikan tempat melaksanakan sholat sedangkan lantai duanya dijadikan tempat mengajinya anak-anak pada malam harinya, dan tanahnya terpisah oleh satu gang.

Lokasi lama bekas pembangunan mesjid Al-Khairat merupakan tanah wakaf yang saat ini dibangun 4 unit Ruko yang dikelola oleh seksi usaha dibawah bidang organisasi dan pembangunan. Disamping itu, yayasan ini mempunyai MDA yang dikepalai oleh Abdul Harris, S.Ag, dan TK oleh Ibu Zainiar.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Potensi

Untuk mengetahui secara jelas dari apa yang dimaksud dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan secara detail.

Potensi berasal dari bahasa latin yaitu *potentia* yang artinya kemampuan. Potensi adalah kemampuan menerima ciri yang lain dari ciri semulanya¹. Potensi adalah sumber yang sangat besar yang belum diketahui dan yang belum diberikan pada waktu saudara lahir dalam dunia ini. Potensi adalah kemampuan yang belum dibukakan, kuasa yang tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang tersembunyi atau dengan kata lain potensi adalah kemampuan atau kekuatan atau daya, dimana potensi dapat merupakan bawaan atau bakat dan hasil stimulus atau latihan dalam perkembangan².

Dari beberapa pengertian diatas potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam didalamnya menunggu untuk diwujudkan menjadi suatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut.

¹ Ensiklopedi Indonesia, *Departemen Pendidikan dan kebudayaan*, (Jakarta : Pakhi Pamungkas, 1997) h. 358).

² (<http://abihafiz.wordpress.com>) Akses Jum'at, 25 Maretl 2011.

2. Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab yakni, (يقف , وقف) . dikatakan (dalam bahasa Arab) “Waqafa” maksudnya seseorang berhenti dari berjalan.³ Secara etimologi, wakaf adalah “*al-habs*” yang berasal dari bahasa-yahbisu- habsan. Secara harfiah wakaf berarti “ menahan, mengekang, atau menghentikan.” Sedangkan secara terminologi, yaitu “ *Tahbiisul Ashl wa Tasbiilul Manfa’ah*” maksudnya menahan sesuatu barang dan memberikan manfaatnya. Atau menghentikan perpindahan hak milik atas harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkannya kepada pengelola, baik perseorangan, keluarga, maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah SWT⁴.

Sedangkan menurut istilah (syara’) yang dimaksud dengan *wakaf* sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama,⁵ adalah sebagai berikut :

- a. Muhammad al-Syarbini al-khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *wakaf* ialah Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (penggolongan) dalam penjagaannya atas *Mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.

³ Syaikh M. Bin Shalih al-‘Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat*, (Jakarta : Pustaka Imam Syafi’i, 2005), h.5.

⁴ Ensiklopedi Islam 7, *TAAw-ZUNN*, (Ichtiar Baru Van Hoeve), h. 238

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 2007), h. 239.

- b. Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah Swt.
- c. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan serta dimaksudkan untuk mendapat ridho Allah.
- d. Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah, menahan harta yang mungkin dapat diambil manfaatnya, kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya.

Para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf, sebagaimana tercantum buku-buku fiqh. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut⁶.

Pertama, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi

⁶ [Hhttp://nurkholis 77.stff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara produktif-di-Indonesia](http://nurkholis77.stff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-Indonesia). Akses Jum'at, 25 Maretl 2011

pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

Kedua, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

Ketiga, Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah. Menurut Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi, wakaf adalah *habsul mali yumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa'I ainihi 'ala mashrafin mubahin* (menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan). Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (*al-'ain*), dalam arti harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan.

Keempat, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Demikianlah pengertian wakaf menurut para ulama ahli fiqh.

Wakaf merupakan akad mengikat (lazim yang tidak boleh dibatalkan, dijual, diberikan, diwariskan dan digadaikan. Bila nilai manfaatnya hilang karena rusak atau sebab lainnya atau adanya kemaslahatan lain, boleh dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk hal yang semisal seperti membangun mesjid yang serupa.

Sebagai mesjid yang hilang nilai manfaatnya maka boleh dijual dan dibuat mesjid lain untuk menjaga kemaslahatan wakaf, selama hal tersebut tidak menimbulkan kerusakan atau mudhorat kepada orang lain⁷. Boleh mengubah benda wakaf demi kemaslahatan, seperti membuat rumah menjadi toko, kemudian kebun menjadi rumah. Adapun pembiayaan wakaf diambil dari hasil-hasil produksinya selama tidak ada syarat diambil dari yang lain⁸.

3. Produktif

Kata produktif yang berasal dari bahasa Inggris telah menjadi kata dalam bahasa Indonesia dengan definisi yaitu banyak mendatangkan hasil.⁹ Sebelum menguarikan makna kata produktif, akan penulis uraikan terlebih dahulu mengenai definisi dan makna produktivitas. Jika dilihat dari asal katanya dalam bahasa Inggris, produktivitas (*Produktivitiy*) berasal dari kata *produce* yang berarti menghasilkan. Jadi, produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan, atau tingkat hasil yang diperoleh seseorang. Orang yang produktivitasnya tinggi adalah orang yang mencapai banyak hasil dalam

⁷Muhammad bin ibrahim bin abdullah at-tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, (Jakarta timur : Darus Sunnah Press, 2007) Cet ke-2, h. 940.

⁸ *Ibid.*

⁹Tim Prima Pena, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jaskarta : Balai Pustaka, 1990)

hidupnya. Semakin tinggi tingkat produktivitasnya berarti semakin banyak hasil yang ia capai. Oleh Steve Pavlina, definisi produktivitas ini ditulis dalam bentuk persamaan : $\text{Produktivitas} = \text{Nilai} / \text{waktu}$. Artinya produktivitas dikatakan meningkat kalau kita bisa menghasilkan lebih banyak dalam jangka waktu yang sama, atau kalau kita bisa menghasilkan sama banyak dalam jangka waktu yang lebih singkat. Dari persamaan itu tampak bahwa ada dua cara untuk meningkatkan produktivitas :

- a. Meningkatkan nilai yang dihasilkan, atau
- b. Menguralkan waktu yang dibutuhkan.

Sedangkan definisi dan makna produktif adalah penggabungan antara efektif dan efisien atau dalam bentuk persamaan $\text{Produktif} = \text{Efektif} + \text{Efisien}$. Efektif berarti kita melakukan hal-hal yang benar (*do the right things*), sedangkan efisien berarti kita melakukannya dengan cara yang benar (*do the things right*). Kalau kedua hal ini digabung maka kita akan menjadi orang yang produktif , yaitu orang yang bisa menghasilkan banyak untuk waktu yang diberikan. Tentu, langkah pertamanya adalah memilih hal-hal yang benar untuk dilakukan (efektif). Setelah memilih hal-hal yang benar untuk dilakukan barulah kita berusaha untuk melakukannya dengan cara yang benar.

4. Wakaf Produktif

Secara ekonomi, wakaf adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang

untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat yang akan datang¹⁰ atau dengan kata lain definisi wakaf produktif harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah yang dipergunakan untuk bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, jalan dan jembatan untuk dimanfaatkan sebagai jasa penyeberangan dan ongkosnya diambil dari orang yang menggunakannya. Akan tetapi hasil dari itu semua disalurkan kepada orang-orang yang berhak, sesuai dengan tujuan wakaf tersebut¹¹.

Definisi wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf¹².

Dari beberapa definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa potensi wakaf produktif merupakan suatu kekuatan, kemampuan yang ada pada harta wakaf yang dikelola oleh seorang nazhir yang profesional, sehingga dapat menambah nilai manfaat dari harta tersebut.

Hasil atau produk dari harta wakaf berdasarkan substansi ekonomi dapat dibagi menjadi dua bentuk yakni¹³:

¹⁰ Qahaf Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar Grup, 2007) , Cet ke-3, h. 60.

¹¹ *Ibid*, h. 5

¹² Jaih Mubarak, *loc.cit.*

¹³ Qahaf Mundzir, *op.cit.*, h.22-23.

- a. Harta wakaf yang menghasilkan pelayanan yang berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit untuk mengobati orang sakit secara cuma-cuma, sekolah, rumah yatim piatu, . Hal ini dapat dikategorikan sebagai wakaf langsung.
- b. Harta wakaf untuk dikelola untuk tujuan investasi dan memproduksi barang atau jasa pelayanan yang secara syara' hukumnya mubah, apapun bentuknya dan bisa dijual dipasar, agar keuntungan yang bersih dapat disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan wakif, Wakaf ini dikategorikan sebagai wakaf produktif.

Jadi perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya untuk perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf, sebab wakaf seperti tidak bisa menghasilkan sesuatu dan tidak boleh dipergunakan untuk tujuan tersebut. Sedangkan wakaf produktif sebagian hasilnya dipergunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf, dan selebihnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

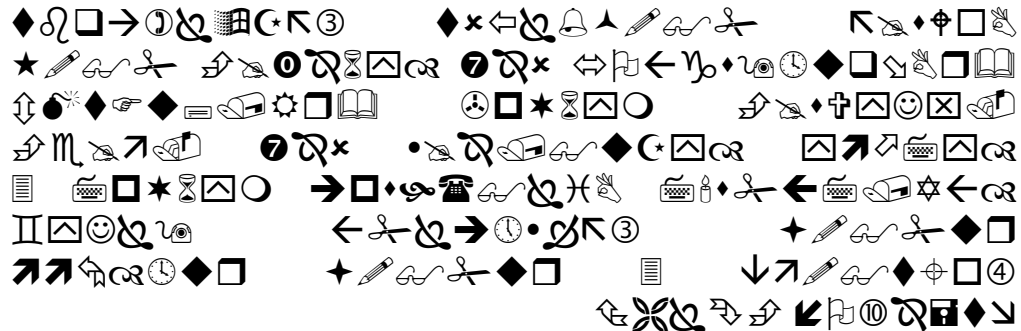
B. Dasar Hukum

Dalil yang menjadi dasar hukum wakaf adalah sumber hukum islam yang utama yakni Al-Qur'an As- Sunnah dan Undang-undang No.41. Secara umum tidak terdapat ayat Al-qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara kongkrit tekstual. Wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang

digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf didasarkan kepada keumuman ayat-ayat al-qur'an yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*.

Diantara ayat-ayat tersebut antara lain.

1. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah:261



Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui¹⁴.

2. Menurut As-sunnah

Hadist diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a No. 1000¹⁵.

: قال عمر للنبي صل الله عليه وسلم ان المائة سهم التي لي
بخير لم اصب مالا قط اعجب الي منها قد اردت ان اتصدق بها ؟ فقال النبي
صل الله عليه وسلم : احبس اصلها وسبل ثمرتها (

“Diriwayatkan dari Ibn Umar, ia mengatakan : Saya mempunyai se-ratus saham di khaibar, saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar” Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) pokoknya dan jadikan buahnya sedekahkan untuk sabililillah.

¹⁴ Depag, *Al-qur'an dan Terjemahan*, op. cit., h. 44.

¹⁵ M. Nashiruddin Al-Abani, *loc.cit*.

Menurut sebagian riwayat tanah tersebut dibeli Umar. Hadist ini menunjukkan bahwa Rasulullah memperbolehkan penahan pokok harta dan penyaluran buahnya sebagai sedekah¹⁶.

3. Hukum Positif Indonesia

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, telah hadir beberapa perangkat peraturan hukum mengenai wakaf khususnya tanah. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut adalah¹⁷.

- a. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang peraturan dasar wakaf pokok-pokok agrarian. Pasal 49 ayat (1) memberi isyarat bahwa “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah”.
- b. Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961 tentang pendaftaran tanah. Karena peraturan ini berlaku umum, maka terkena juga didalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.
- c. Peraturan menteri Agama No. 1 tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 tanggal 10 Januari 1978 tentang perwakafan tanah milik.

Dari beberapa peraturan perundang-undangan diatas masih sangat terbatas, yang diatur hanya benda-benda tak bergerak serta peruntukannya

¹⁶ Jaih Mubarak, *op. cit*, h. 40

¹⁷ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rajawali Press, 2004) h. 29-32.

lebih banyak untuk kepentingan ibadah Mahdhah seperti, mesjid, musholla, pesantren, kuburan, dan lain sebagainya.

Undang – undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf merupakan penyempurnaan serta menambah hal-hal baru sesuai dengan perkembangan wakaf. Khususnya di Indonesia Undang-Undang ini telah mengikuti paradigma baru wakaf sebagai instrumen peningkatan ekonomi umat melalui pemberdayaan wakaf produktif yang dikelola secara profesional.

C. Syarat dan Rukun Wakaf dalam Konteks Fiqh Indonesia

Rukun wakaf dalam hukum fiqh ada empat yaitu: (1) orang yang berwakaf (*al-waqif*). (2) benda yang diwakafkan (*al-mauquf*). (3) orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauquf 'alaihi/nadzir*). (4) lafadz atau ikrar wakaf (*sighah*). Sedangkan dalam UU Wakaf Pasal 6 yang merupakan fiqh Indonesia yang telah diundangkan, selain 4 rukun tersebut, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi 6 unsur, yaitu 4 unsur tersebut ditambah dengan dua unsur lain yaitu: peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

Dalam konteks ini, wakif meliputi perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. Wakif perseorangan dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan merupakan pemilik sah harta benda wakaf. Wakif organisasi dan badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi atau badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf

milik organisasi atau badan hukum sesuai dengan anggaran dasar organisasi atau badan hukum yang bersangkutan¹⁸.

Syarat-syarat harta yang diwakafkan (*al-mauquf*) harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: *al-mauquf* harus barang yang berharga, *al-mauquf* harus diketahui kadarnya, *al-mauquf* dimiliki oleh wakif secara sah, *al-mauquf* harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (*mufarrazan*). Harta benda wakaf bisa berbentuk benda tidak bergerak ataupun benda bergerak. Yang termasuk benda tidak bergerak sesuai dengan pasal 16 ayat 2, UU No. 41 Tahun 2004 yang dapat diwakafkan antara lain¹⁹:

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi dan berdasarkan pasal 16 ayat 3 UU No. 41 Tahun 2004 antara lain: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak

¹⁸ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Garsindo, 2006), h. 25 .

¹⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 439.

atas kekayaan intelektual, hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku²⁰.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pemahaman tentang benda wakaf hanya sebatas benda tak bergerak, seperti tanah adalah kurang tepat. Karena wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa, sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang.

Syarat-syarat shighat berkaitan dengan ikrar wakaf, yaitu harus memuat nama dan identitas Wakif, nama dan identitas Nazhir, keterangan harta benda wakaf, dan peruntukan harta benda wakaf, serta jangka waktu wakaf. Pada prinsipnya, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

1. Sarana dan kegiatan ibadah;
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pemahaman tentang pemanfaatan harta benda wakaf yang selama ini masih terbatas digunakan untuk tujuan ibadah saja (yang berwujud misalnya: pembangunan

²⁰ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaanya.

masjid, kompleks kuburan, panti asuhan, dan pendidikan) adalah kurang tepat. Nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini juga bagian dari ibadah.

D. Sejarah dan Perkembangan Wakaf di Indonesia

Perilaku sejenis wakaf telah dikenal umat manusia sebelum Islam datang. Umat manusia terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut sesungguhnya telah mengenal beberapa bentuk praktik pendayagunaan harta benda, yang substansinya tidak jauh berbeda dengan wakaf dalam Islam. Hal ini disebabkan pada dasarnya, umat manusia sudah menyembah Tuhan melalui ritual keagamaan sesuai kepercayaan mereka. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor pendorong bagi setiap umat beragama untuk mendirikan bangunan peribadatannya masing-masing²¹.

Mereka yang memiliki kepedulian serta perhatian terhadap kelangsungan agamanya rela melepaskan sebagian tanahnya atau menyumbangkan sebagian harta miliknya untuk kepentingan rumah peribadatan. Contoh yang paling nyata dari adanya praktik wakaf sebelum Islam adalah dibangunnya *al-Ka'bah al-Musyarrafah* oleh Nabi Ibrahim as. Hanya saja, dalam perjalanan

²¹ Adijani Al-Alabij, *op cit.*, h. 10.

waktu, Ka'bah pernah digunakan sebagai tempat penyembahan berhala, padahal sebelumnya adalah tempat beribadah kepada Allah Swt²².

Jika praktek wakaf telah dikenal sebelum Islam, maka yang membedakannya dengan wakaf dalam Islam adalah bahwa praktek wakaf yang diamalkan masyarakat jahiliyah dilakukan semata-mata hanya untuk mencari prestise (kebanggaan). Sedangkan dalam Islam bertujuan untuk mencari ridla Allah dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada-Nya.

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yaitu wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun mesjid²³. Sebagian ulama menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Praktek wakaf juga berkembang luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah dan dinasti sesudahnya, banyak orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga

²² *Ibid.*

²³ DEPAG, *Paradigma Baru Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 70.

pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Di Indonesia, kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga sekaligus memperkenalkan ajaran wakaf. Hal ini terbukti dari banyaknya mesjid-mesjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi Nusantara, baik pada masa dakwah pra kolonial, masa kolonial, maupun pasca kolonial pada masa Indonesia merdeka.

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Masa pemerintahan kolonial merupakan momentum kegiatan wakaf. Karena pada masa itu, perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, mesjid, semuanya merupakan swadaya dan berdiri di atas tanah wakaf. Namun, perkembangan wakaf kemudian hari tak mengalami perubahan yang berarti. Kegiatan wakaf dilakukan terbatas untuk kegiatan keagamaan, seperti pembangunan mesjid, mushalla, langgar, madrasah, perkuburan, sehingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang bermanfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak.

Walaupun beberapa aturan telah dibuat oleh pemerintah terkait dengan mekanisme wakaf, seperti PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, akan tetapi PP ini hanya mengatur wakaf pertanahan saja. Ini berarti tak jauh beda dengan model wakaf pada periode awal, identik dengan wakaf tanah, dan kegunaannya pun terbatas pada kegiatan sosial keagamaan, seperti mesjid, kuburan, madrasah, dan lain-lain.

Karena minimnya regulasi yang mengatur tentang perwakafan, maka tidaklah heran jika perkembangan wakaf di Indonesia mengalami stagnasi. Stagnasi perkembangan wakaf di Indonesia mulai mengalami dinamisasi ketika pada tahun 2001, beberapa praktisi ekonomi Islam mulai mengusung paradigma baru ke tengah masyarakat mengenai konsep baru pengelolaan wakaf tunai untuk peningkatan kesejahteraan umat. Ternyata konsep tersebut menarik dan mampu memberikan energi untuk menggerakkan kemandegan perkembangan wakaf. Kemudian pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut konsep tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*waqf al-nuqud*).

Fatwa MUI tersebut kemudian diperkuat oleh hadirnya UU No. 41/2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya benda tidak bergerak, tetapi juga dapat berupa benda bergerak, seperti uang. Selain itu, diatur pula kebijakan perwakafan di Indonesia, mulai dari pembentukan nashir sampai dengan pengelolaan harta wakaf. Untuk dapat menjalankan fungsinya, UU ini masih memerlukan perangkat lain yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama tentang Wakaf Uang yang akan

menjadi panduan pelaksanaan dalam implementasinya, serta adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang akan berfungsi sebagai sentral nazhir wakaf. Setelah melalui proses panjang, pada penghujung tahun 2006 terbitlah PP No. 42/2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf. Setelah itu, pada juli 2007 keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 75/M tahun 2007 yang memutuskan dan mengangkat keanggotaan BWI periode 2007-2010²⁴.

Dengan demikian, ternyata dalam perjalanan sejarahnya, wakaf terus berkembang dan insyaAllah akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan dengan tetap mengedepankan dan berpandukan prinsip Syariah. Lahirnya UU wakaf berikut peraturan turunannya merupakan titik tolak peningkatan pemberdayaan potensi wakaf di Indonesia ke arah yang lebih produktif dalam bingkai fiqh Indonesia.

E. Paradigma Wakaf Produktif

Ahmad Djunaidi dan kawan-kawan (pada tahun 2005) menawarkan dua hal yang berkaitan dengan wakaf produktif : *Pertama*, asas paradigma wakaf (baru) produktif. *Kedua*, Aspek-aspek paradima wakaf (baru) produktif²⁵.

Adapun yang termasuk kedalam asas tersebut antara lain :

1. Asas Keabadian Manfaat

Praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh Nabi yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan diikuti oleh beberapa sahabat Nabi yang lain

²⁴ Elsi Kartika Sari, *op.cit.*, h. 22.

²⁵ Jaih Mubarak, *op. cit*, h. 27.

sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf, dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda tersebut. Pemahaman yang paling mudah untuk dicerna dari maksud Nabi adalah bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan kebajikan umum²⁶.

2. Asas Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban merupakan asas paradigma baru wakaf. Sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi *ilahiyyah* dan *insaniyyah*, wakaf harus dipertanggung jawabkan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut adalah pengelolaan secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan kepada :

- a) Tanggung jawab kepada Allah SWT atas perilaku dan perbuatannya, apakah perilakunya itu sesuai atau bertentangan dengan atauranaturanNya.
- b) Tanggung jawab kelembagaan, yaitu tanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang, yaitu lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang organisasi keNazhiran yang terdiri dari sub-sub organisasi pengelolaan dan pengembangan, masing-masing sub harus bertanggung jawab kepada lembaga yang lebih tinggi. Sehingga fungsi-fungsi kontrol organisasi dapat berjalan dengan baik agar amanah yang sedang diemban dapat dipenuhi secara optimal.

²⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *op.,cit*, h. 67.

- c) Tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan saluran-saluran dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Seorang Nazhir atau orang yang diberikan wewenang dalam pengelolaan wakaf selaku pemegang amanah harus mampu mempertanggung jawabkan tindakannya, bahwa apa yang dilakukannya itu benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku.
- d) Tanggung jawab sosial, yaitu yang tanggung jawab yang terkait dengan moral masyarakat. Seseorang (Nazhir wakaf) dalam melakukan tindakan harus dapat dipertanggung jawabkan pula kepada masyarakat secara moral bahwa perbuatannya itu bisa aman secara sosial, yaitu tidak mencederai norma-norma sosial yang ada dimasyarakat. Karena apabila melakukan perbuatan yang tercela, bersangkutan akan mendapat sanksi sosial berupa dipermalukan ditengah-tengah masyarakat²⁷.

3. Asas Profesionalisme Manajemen

Manajemen pengelolaan menempati pada posisi paling urgen dalam dunia perwakafan . karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung tergantung pada pola pengelolaan, bagus atau buruk.

Dalam sebuah teori manajemen modern bisa disebut dengan istilah TQM (Total Quality Manajemen), yang terdiri dari empat hal²⁸ ;

- a. Amanah
- b. Shiddiq (Jujur)

²⁷ *Ibid*, h. 76-79.

²⁸ *Ibid*, h. 82-83.

- c. Fathanah (cerdas/brilliant)
- d. Tabligh (menyampaikan informasi yang benar/transparan)

Sedangkan, potret kepemimpinan manajemen yang baik dalam lembaga keNazhiran bisa dilihat dari tiga Aspek²⁹ :

Pertama, *transparansi*. Dalam kepemimpinan manajemen *profesional*, transparansi menjadi ciri utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Ketika aspek transparansi sudah ditinggalkan, maka kepemimpinan tidak akan berjalan dengan baik, bahkan membuka peluang terjadinya penyelewengan yang tak terkendali.

Kedua, *Public accountability* (pertanggungjawaban umum). Pertanggungjawaban umum merupakan wujud dari pelaksanaan sifat *amanah* (kepercayaan) dan *shiddiq* (kejujuran). Karena kepercayaan dan kejujuran memang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Ketiga, *aspiratif* (mau mendengar dan mengakomodasi seluruh dinamika lembaga keNazhiran. Seorang Nazhir yang dipercaya mengelola harta milik umum harus mendorong terjadinya sistem sosial yang melibatkan partisipasi banyak kalangan.

4. Asas Keadilan Sosial

Penegakan keadilan sosial dalam Islam merupakan kemurnian dan realitas ajaran agama. Orang yang menolak prinsip keadilan sosial ini dianggap sebagai pendusta agama (QS. 147/al-Ma'un: 17). Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf sangat tampak adanya semangat menegakkan

²⁹ *Ibid*, h.84-85.

keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kebajikan yang bersifat anjuran, tetapi daya dorong untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan sangat tinggi. Karena prinsip yang mendasari ibadah wakaf adalah terciptanya sosial kemasyarakatan yang dibangun diatas kesamaan hak dan kewajiban sebagai makhluk Allah.

Konsepsi keadilan sosial ekonomi yang Islami mempunyai ciri khas dari konsep ekonomi yang lain, diantaranya ³⁰:

Pertama, keadilan sosial dilandasi prinsip keimaman, yaitu bahwa semua orang yang ada di alam semesta adalah milik Allah (QS. 10 /Yunus : 55). Ajaran islam tidak membenarkan seseorang melakukan penimbunan kekayaan (*ikhtikar*) demi kepentingan diri sendiri, karena manusia hanyalah sebagai khalifah dan pemegang amanah Allah untuk memfungsikan harta.

Kedua, menggalakkan sistem pendistribusian kembali pendapatan yang sifatnya *built in*, yang lebih diefektifkan lagi dengan mengaitkannya pada ridha Allah.

Ketiga, keadilan sosial dalam Islam berakar pada moral. Implikasinya secara otomatis mendorong kewajiban untuk berbuat adil dan saling membantu.

Sedangkan yang tergolong kedalam Aspek – aspek paradigma wakaf produktif adalah :

1. Pembaharuan Paham tentang wakaf

³⁰ *Ibid*, h. 91-92.

Pelaksanaan pembaharuan sudah dan sedang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dengan wakaf adalah :

- a. Sertifikat tanah wakaf
- b. Pertukaran benda wakaf
- c. Pola seleksi yang dilakukan oleh para Nazhir wakaf atas pertimbangan manfaat.
- d. Sistem ikrar yang dilakukan oleh para calon wakif diarahkan kepada bentuk ikrar wakaf untuk umum, tanpa penyebutan yang bersifat khusus seperti yang terjadi selama ini.
- e. Perluasan benda yang diwakafkan (mauquf bih).
- f. Persyaratan Nazhir
- g. Pemberdayaan, pengembangan dan pembinaan.

2. Sistem Manajemen Pengelolaan

kata pengelolaan berasal dari kata kelola. Kata ini memiliki makna diantaranya adalah mengendalikan, menyelenggarakan (pemerintah); mengurus (perusahaan, proyek, dan sebagainya) ; menjalankan. Jika telah diberi telah diberi imbuhan dan menjadi kata pengelolaan, maka maknanya dapat diuraikan sebagai berikut ³¹.

- a. Proses, cara, perbuatan mengelola
- b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, dan

³¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007) h. 54.

- c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.

Sedangkan kata pengembangan berasal dari kata dasar kembang. Memiliki makna mekar terbuka atau membentang (tentang barang yang berlipat atau kuncup), menjadi besar (luas, banyak, dan sebagainya) menjadi bertambah sempurna (tentang pribadi, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya) menjadi banyak (merata, meluas, dan sebagainya), dan ketika mendapat imbuhan menjadi kata pengembangan, maknanya menjadi proses, cara, perbuatan.

Pola manajemen pengembangan wakaf selama ini berjalan adalah pola manajemen pengelolaan yang terhitung masih tradisional –konsumtif. Hal itu diketahui melalui oleh beberapa aspek :

- a. Kepemimpinan, tidak ada sistem kontrol yang memadai.
- b. Rekrutmen SDM keNazhiran. Banyak Nazhir wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan, seperti ulamam kyai, ustadz dan lain-lain.
- c. Operasionalisasi pemberdayaan
- d. Pola pemanfaatan hasil. Dalam menjalankan upaya pemanfaatan hasil wakaf masih banyak yang bersifat konsumtif-statis sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.
- e. Sistem kontrol dan pertanggung jawaban. Sebagai resiko dari pola kepemimpinan yang sentralistik dan lemahnya sistem kontrol, baik yang bersifat kelembagaan, pengembangan usaha maupun keuangan.

Untuk itu, sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan paradigma wakaf produktif, sistem manajemen pengelolaan wakaf harus ditampilkan lebih profesional dan modern itu bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolaan:

- a. Kelembagaan (Badan Wakaf Indonesia)
- b. Pengelolaan operasional
- c. Kehumasan
- d. Sistem keuangan

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, kata pengelolaan dan pengembangan terdapat pada BAB V yakni Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Bahkan pada pasal 43 ayat (2), dibarengi juga dengan kata wakaf produktif.

Maka dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf adalah proses kerja yang dilakukan oleh nazhir yakni tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yakni ;

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Sedangkan pengembangan wakaf produktif adalah hasil wakaf produktif yang dikelola yang dapat menjadikan harta wakaf tersebut menjadi

bertambah banyak atau bertambah luas, bahkan dapat membentuk harta benda wakaf baru. Jika merujuk pada pengelolaan dan pengembangan harta wakaf produktif saat ini yang telah di praktekkan di beberapa negara, maka biasanya harta wakaf yang terletak di kawasan perkotaan sebaiknya merupakan proyek pemukiman dan perdagangan sedangkan harta wakaf yang terletak pada kawasan diluar kota adalah proyek pertanian.

Tabel 3
Jenis- jenis usaha yang cocok pada kategorisasi tanah wakaf strategis³².

NO	Kategori Tanah	Jenis Lokasi Tanah	Jenis Usaha
1	Pedesaan	Tanah Persawahan	- Pertanian - Tambak Ikan
		Tanah Perkebunan	- Perkebunan - Home Industri - Tempat Wisata
		Tanah Ladang atau padang Rumput	- Palawija - Real Estate - Pertamanan - Home industri
		Tanah Rawa	- Perikanan - Tanam Sayuran
		Tanah Perbukitan	- Tempat Wisata -Perkebunan - Bangunan -Home Industri - Penyulingan air mineral
2	Perkotaan	Tanah Penggir	- Perkantoran
		Jalan Raya	- Pusat Perbelanjaan -Apartemen - Hotel/penginapan - Gedung Pertemuan -Pertokoan - Rumah Sakit -Rumah Makan - Sarana Pendidikan -Pom Bensin - Apotek -Wartel/Warnet - Bengkel Mobil -Outlet - Warung
		Tanah Dekat /di dalam perumahan	- Sarana pendidikan - Klinik - Apotek - Outlet - Warung - Catering - BMT
		Tanah dekat keramaian (Pasar,	- Pertokoan - Rumah makan - Bengkel -BPRS/BMT

³² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *op.cit.* h. 106.

		Terminal, Stasiun, sekolah, umum)	- Warung - Klinik	-Wartel/ Warnet -Jasa Penitipan
3	Tepi Pantai	Pinggir Laut	- Tambak Ikan - Kerajinan	- Objek Wisata
		Rawa Bakau	- Perkebunan	

Jenis-jenis usaha di perkotaan sebaiknya digambar oleh arsitektur muslim profesional dimana didalamnya harus jelas tergambar indah dan kokoh dengan cerminan bangunan yang Islami. Di dalamnya harus disediakan tempat-tempat ibadah, seperti mesjid, musholla dengan *Space* proporsional.

Sebagai langkah awal pengembangan harta wakaf produktif perlu dilakukan dengan cara memilih asset wakaf yang ada dan yang sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak (*fixed Asset*), maka terdapat wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan, terutama dalam hal wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu di dorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif.

Islam mengakui bahwa tanah (semua unsur tanah, termasuk tanah wakaf produktif strategis) sebagai faktor produksi. Dalam hazanah pemikiran klasik yang masih relevan dengan masa sekarang ini, bahwa tanah yang dianggap sebagai suatu faktor produksi penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, seperti permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber daya udara, air mineral dan sebagainya. Baik Al-qur'an maupun As-sunnah banyak memberikan tekanan pada pentingnya pemberdayaan tanah secara baik. Al-qur'an sangat menganjurkan agar tanah yang kosong dikelola secara produktif (*ahya' al-amwat*). Oleh karena itu, tanah wakaf yang dianggap strategis harus dikelola secara produktif dalam

rangka meningkatkan nilai untuk kesejahteraan umat³³. Bentuk pengelolaannya diwujudkan dalam bentuk-bentuk usaha pengembangan dan pemberdayaan yang dapat menghasilkan untung, baik melalui produk barang maupun jasa.

Hasil dari pengembangan wakaf yang dikelola secara profesional dan amanah oleh lembaga-lembaga kenazhiran maupun oleh badan wakaf Indonesia (BWI) sendiri kemudian dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat dan bantuan atau pengembangan sarana prasarana ibadah.

3. Sistem Manajemen Kenazhiran

Human skill berkenaan dengan keahlian Nazhir dalam bidang tertentu yang berkenaan dengan amanah untuk mengembangkan harta wakaf. Secara personal Nazhir haruslah orang-orang yang mempunyai reputasi dan kredibilitas moral yang baik, yaitu bersifat jujur, adil dan amanah.

Pada tataran kompetensi keilmuan, seorang nazhir harus menguasai ilmu-ilmu syari'ah, juga mesti menguasai materi-materi fikih muamalah, khususnya yang berhubungan dengan wakaf. Selanjutnya, pemahaman terhadap ilmu ekonomi, seperti keuangan, manajemen, akuntansi, dan ilmu ekonomi Islam adalah suatu keharusan yang tidak bisa tidak harus dimiliki oleh Nazhir. Karena dengan pemahaman yang baik terhadap ilmu-ilmu

³³ *Ibid*, h. 106

tersebut seorang Nazhir mampu merealisasikan maksud dan tujuan dari wakaf produktif. Dalam literatur fiqh, pengelola wakaf disebut dengan nazhir.

Dalam kamus Arab Indonesia Ahmada Warson Munawwir arti nazhir adalah penjaga, manager, administrator, kepala atau direktur. Menurut as Shan ani pengertian nazhir adalah orang atau pihak yang berhak untuk bertindak terhadap harta wakaf, baik untuk memelihara, mengerjakan berbagai hal yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik, maupun mendistribusikan hasilnya kepada orang yang berhak menerima³⁴.

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1, yang dimaksud nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Kemudian dalam pasal 11 dinyatakan bahwa tugas nazhir juga mencakup pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf, baik karena peristiwa-peristiwa *force majeure* maupun karena kerugian/kegagalan investasi³⁵.

Menurut Dr. Idris Khalifah, ketua forum Ilmiah di Tethwan Magribi, dalam hasil penelitiannya yang berjudul Istitsmar Mawarid al-Awqaf bahwa tugas nazhir wakaf diantaranya adalah memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat, serta bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya³⁶.

³⁴ Departemen Agama, *Nazhir Profesional dan Amanah*, (direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji :TP, 2005), h. 67.

³⁵ Undang-undang No. 41 Tentang Wakaf.

³⁶ Hhttp://rol.republika.co.id. akses kamis, 15 April 2010.

Untuk itu nazhir profesional yang diharapkan dalam pengelolaan wakaf. Nazhir wakaf yang profesional adalah jika memenuhi kriteria sebagai berikut³⁷ :

1. Ahli dibidangnya. Kehalian dan keterampilan khusus ini umumnya dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Oleh karenanya nazhir profesional dapat mengenali cukup cepat dan tepat persoalan yang dihadapi serta solusi yang tepat.
2. Meluangkan seluruh waktu, tenaga, perhatian untuk pekerjaannya atau fulltimer. Sebagai konsekuensinya ia dibayar dengan gaji yang tinggi. Di Indonesia bagian untuk nazhir adalah paling tinggi yakni 10% dari hasil bersih pengelolaan wakaf.
3. Komitmen pribadi yang mendalam yang menghasilkan tanggung jawab yang besar atas pekerjaan.
4. Seorang nazir harus memenuhi beberapa syarat³⁸.
 - a. Syarat Moral, meliputi paham tentang hukum wakaf, baik dalam tinjauan syari'ah dan perundang-undangan negara RI, Jujur amanah dan adil, bersungguh-sungguh dan suka tantangan, mempunyai kecerdesan emosional dan spiritual.
 - b. Syarat Manajemen, meliputi mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership, profesional dalam bidang pengelolaan harta, ada masa bakti nazhir, memiliki program kerja yang jelas.

³⁷ Departemen Agama, *Op Cit*, h. 69.

³⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Depag, 2007), h. 51-52.

- c. Syarat Bisnis, meliputi mempunyai keinginan, mempunyai pengalaman dan siap dimagangkan, mempunyai ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *entrepreneur*.

Dalam UU wakaf No. 41 tahun 2004 pasal 9 bentuk nazhir yang diakui adalah perorangan, badan hukum dan organisasi.

4. Sitem rekrutmen wakif

Sistem rekrutmen wakif dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan ;

- a. Pendekatan keagamaan
- b. Pendekatan kesejahteraan sosial
- c. Pendekatan bukti keberhasilan pengelolaan
- d. Pendekatan efektivitas pemanfaatan hasil

F. Potensi Wakaf Produktif di Indonesia

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam Islam yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan umat islam, sehingga wakaf dapat dikatakan mampu mengangkat kondisi umat Islam dari kondisi terpuruk menuju umat yang terbaik (khoiru ummah)³⁹.

Ada beberapa faktor yang menjadi potensi dari wakaf produktif diantaranya⁴⁰ :

1. *Fleksibilitas* konsep fikih wakaf

³⁹ <http://wennyrad.Multiply.com/journal/item/134>, Tanggal 07 Januari 2011

⁴⁰ Achmad Djunaidi, *op.cit.* h. 65

Wakaf berbeda dengan zakat, tidak ada dalam Al-qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, bahkan tidak ada satu ayatpun yang menyinggung kata "waqf". Sehingga dasar utama disyaria'kannya wakaf berdasarkan konteks ayat Al-qur'an sebagai sebuah amal kebaikan diataranya dalam surat Al-Haj :7, Ali Imran : 92, dan Al-Baqarah : 261.

Dengan demikian pengembangan hukum-hukum wakaf ditetapkan dari hasil ijtihad. Apabila suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat *fleksibel*, terbuka penafsiran-penafsiran baru, *dinamis* dan *futuristik*. Sehingga ajaran wakaf memiliki potensi besar untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman.

2. Kekakyaan / harta benda wakaf

Kekayaan tanah dan bangunan wakaf di Indonesia sangat besar jumlahnya dan memiliki potensi ekonomi tinggi. Beberapa menempati lokasi yang strategis. Cukup banyak diantaranya dibangun untuk mesjid dan musholla, sedang sisa tanahnya masih luas dan dapat dibangun gedung pertemuan, ruko tempat usaha atau gedung perkantoran, bahkan rumah sewa. Hasil dari penyewaan atau hasil usaha yang dikelola tersendiri tersebut dapat digunakan untuk perawatan asset wakaf atau untuk pemberdayaan ekonomi lemah.

3. *Booming* sistem ekonomi syari'ah

Meningkatnya kesadaran beragam dan terjadinya krisis ekonomi diberbagai belahan dunia, membuat mata dan pikiran ekonom muslim terbuka menggali kembali serta mengembangkan sistem ekonomi yang

berlandaskan qur'an dan sunnah. Dimulai dengan munculnya lembaga keuangan syari'ah seperti : perbankan syari'ah asuransi syari'ah , kelembagaan amil sampai dengan kelembagaan nazhir. Khazanah islam begitu beragam, aplikatif dan dapat menjadi solusi atau sistem ekonomi alternatif saat ini.

4. Menguatnya kualitas SDM berwawasan syari'ah

Boomingnya sistem ekonomi syari'ah tentu berdampak kepada kebutuhan akan sumber daya manusia yang bekerja dan ditempatkan dilembaga keuangan syari'ah. Atau dibutuhkan SDM dalam mengembangkan sistem ekonomi tersebut, dan jika ingin wakaf dapat berkembang dan produktif nazhirlah pelaku utamanya. Dengan munculnya berbagai sekolah tinggi ekonomi Islam atau Universitas yang membuka program ekonomi Islam maka semakin besar pula potensi wakaf untuk dikembangkan.

BAB IV

POTENSI WAKAF PRODUKTIF MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Dalam melakukan analisis data ini, penulis mengklasifikasikan data menjadi potensi wakaf produktif di mesjid-mesjid Kecamatan Sukajadi, pelaksanaan wakaf produktif di mesjid-mesjid Kecamatan Sukajadi, pandangan ekonomi Islam terhadap wakaf produktif di mesjid-mesjid Kecamatan Sukajadi. Penulis akan menganalisa ketiga hal tersebut dengan beberapa aspek yaitu azaz keabadian manfaat, azaz pertanggung jawaban , azaz profesionalisme manajemen, azaz keadilan sosial.

A. Potensi Wakaf Produktif Di Mesjid-Mesjid Kecamatan Sukajadi

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam Islam yang memiliki potensi besar untuk mengangkat kesejahteraan ummat Islam, sehingga wakaf dapat dikatakan mampu mengangkat kondisi umat Islam dari kondisi terpuruk menuju umat yang terbaik, hal ini dapat terjadi apabila wakaf tersebut dikelola secara produktif bukan konsumtif (dinikmati secara langsung).

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari Pihak kecamatan, maka penulis memperoleh data sebagai berikut :

Tabel 4.1 :
Jumlah Masyarakat Muslim di Kecamatan Sukajadi

No	Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT	Islam
1	Jadi Rejo	4	18	4.830
2	Kampung Tengah	7	27	8.515
3	Kampung Melayu	9	38	7.410
4	Kedung Sari	4	15	5.345
5	Harjo Sari	6	18	4.438
6	Sukajadi	5	23	7.693
7	Pulau Karam	3	13	3.621
Jumlah		38	152	41.621

Sumber data : Dokumen Kantor Kecamatan Sukajadi

Kecamatan sukajadi merupakan salah kecamatan yang ada di kota pekanbaru yang terdiri dari tujuh Kelurahan yang mempunyai jumlah penduduk muslim lebih kurang 41.621. hal ini menunjukkan bahwa dengan jumlah yang begitu banyak mempunyai kekuatan untuk membantu sesama muslim melalui *infak fisabilillah*.

Tabel 4.2
Jumlah Mesjid Kecamatan Sukajadi

NO	KELURAHAN	NAMA MESJID	ALAMAT
	JADIREJO		
1		Ar-Rahman	Jl. Sudirman
2		Ar-Rahim	Jl. Pepaya
3		AL-Khairat	Jl. Mangga
4		Fastabikul Khairat	Jl. Pepaya
5		Al-Karomah	Jl. Cut Nyak Dien
6		Al-Hidayah	Jl. Cut Nyak Dien
	Kp. Tengah		
7		Al-Mukarrobin	Jl. Dagang
8		Rahmat	Jl Rahmat
9		Al-Amilin	Jl. Al-Amilin
10		Baitul Makmur	Jl. Durian
11		Nurul Iman Khairat	Jl. Utama
	KP. MELAYU		
12		Al-Falah II	Jl. Murai

13		Baitul Mukminin	Jl. Ababil
14		Al-Fida'	Jl. KH. Ahmad Dhlan
15		Riadussholihin	Jl. Kutilang Ujung
16		Ar-Raudah	Jl. Kuau
17		Da'watul Islam	Jl. Kutilang
18		Babussalam	Jl. Puyuh
19		Al-Jami'ah	Jl. Balam
SUKAJADI			
20		Amal Ikhlas	Jl. Teratai
21		Al-Ikhlash	Jl. Kh Ahmad Dahlan
22		Ikhsan	Jl. Teratai
23		Surya	Jl. Melati
24		Hikmah	Jl. Melati
25		Dakwah	Jl. Teratai
26		Khairun	Jl. Panda
PULAU KARAM			
27		Al-Jami'	Jl. Ahmad Yani
28		Mukhlisin	Jl. Pepaya
HARJOSARI			
29		Al-Mukarromah	Jl. Bunga kertas
30		Mu'amalah	Jl. Dahlia Gg. Jati
31		Annur Brimob	Jl. Durian
32		Ubudiyah	Jl. Rajawali
33		Assyifa'	Jl. Melati (Ibnu Sina)
KEDUNG SARI			
34		Baitul Muttaqin	Jl. Dahlia Ujung
35		Al-Jihad	Jl. Melur
36		Darul Jannah	Jl. Durian
37		Baitul 'Izzah	Jl. Dahlia (Komp. Pemda)

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi

Jumlah mesjid yang ada di Kecamatan Sukajadi terdiri dari 37 mesjid. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola wakaf di Kantor Urusan Agama kecamatan Sukajadi mereka tidak memiliki data berapa sebenarnya mesjid yang betul-betul memiliki harta wakaf yang diproduktifkan. Hal ini dikarenakan nazhir yang ada pada mesjid –mesjid tersebut tidak melaporkan atas perubahan atau penambahan harta wakaf tersebut. Untuk itu penulis melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa pengurus mesjid, dan

berdasarkan informasi dari masyarakat setempat sehingga penulis memperoleh 4 mesjid yang menjalankan wakaf secara produktif terutama mesjid-mesjid yang mau dan bersedia memberikan keterangan mengenai harta wakaf produktif selain dari mesjid. Diataranya mesjid Al-falah II jalan Murai memiliki MDA dan kos-kosan yang terdiri dari 17 kamar, dan mesjid Baitul Mukminin memiliki MDA dan Rumah sewaan sebanyak 4 unit, mesjid Al-khairat dibawah naungan Yayasan Amal Khairat memiliki TK, MDA, dan memiliki 4 toko, kemudian mesjid Dakwah jalan teratai gang bunga memiliki 2 unit rumah kontrakan. Dimana semua itu memiliki potensi untuk dikembangkan. Selain dari keempat mesjid ini mereka juga memiliki potensi wakaf terutama dalam hal pendidikan, namun penulis tidak memasukkan kedalam kategori wakaf produktif tetapi dalam kategori wakaf langsung, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan difokuskan pada wakaf produktif.

Untuk lebih jelasnya mengenai jawaban pengurus , penulis akan menguraikan dari maksud jawaban pengurus yang ada di masing-masing mesjid.

Dari keempat mesjid tersebut mereka memperoleh wakaf baik berupa wakaf bergerak baik berupa tanah untuk dibangun mesjid maupun berupa uang yang merupakan bagian dari shadaqoh jariyah jama'ah untuk mengembangkan harta wakaf tersebut.

1. Mesjid Al-Falah II¹

Mesjid Al-Falah yang terletak di Jalan Murai kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi telah bersertifikat hak milik No. 301 yang diterbitkan pada tanggal 3 Agustus 1996. Berdasarkan AIW Nomor W. 2/25/K.4/96 tanggal 21 Agustus 1996 memiliki luas tanah 1404 m². Nama pemegang dalam sertifikat adalah hak nazhir Drs. Ma'aruf, H.Maralis, dan H. Baharudin.

Wakif pada mesjid ini merupakan tanah wakaf dari pemerintah kota pekanbaru (walikota) yang memberikan wewenang kepada pengurus untuk memanfaatkan tanah tersebut sebagai tempat Ibadah dan sebagainya. artinya selama tidak menghilangkan fungsi dan tujuan tanah wakaf tersebut diperbolehkan, dan menyerahkan sepenuhnya untuk dikelola.

Saat ini tanah wakaf tersebut telah dibangun diatasnya 3 bangunan yakni terdiri dari sebuah mesjid, sebuah rumah untuk imam mesjid serta bangunan 4 lantai, diimana lantai 1 dan 2 dipergunakan untuk kegiatan MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah), lantai 3 dan 4 adalah kos-kosan (17 kamar) untuk mahasiswa dan pelajar. Pembangunan 4 lantai ini dimulai dari penggalangan dana yang dibuat Sknya dari kelurahan. Dari dana tersebut dapat dibangun fondasi, kemudian pembangunannya sempat vacum selama 5 tahun. Dan pada tahun 1995 pembangunan MDA dapat berjalan kembali dengan bantuan dana dari masyarakat terutama pada bulan ramadhan.

¹ Wawancara penulis dengan Bapak Suleman (wakil ketua mesjid Al-falah II) di Jl. Elang No. 18 tanggal 29 Maret 2011, jam 16.30-17.00.

Pada tahun 1998 bangunan 4 lantai tersebut telah dapat digunakan yakni untuk kos-kosan, dan dipergunakan untuk kegiatan MDA sejak tahun 1999. Pada tahun 2006 pemerintah daerah memberi bantuan Rp. 150.000.000, untuk finishing gedung seperti memplester dan mengkeramik.

Jika dilihat dari sumber hukumnya, tidak terdapat ayat al-qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara konkrit tekstual. Maka, penulis berpendapat bahwa harta yang telah diberikan pada mesjid Al-Falah ini merupakan harta wakaf berupa benda tidak bergerak (tanah), dan bergerak (berupa uang, baik dari masyarakat maupun pemerintah).

2. Mesjid Baitul Mukminin²

Mesjid Baitul mukminin yang terletak di jalan Ababil Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi merupakan bagian dari harta tidak bergerak (tanah) seluas 1.148 m² dengan Nomor 52 dan diterbitkan pada tanggal 31 Maret 1990. Diatas tanah ini telah dibangun sebuah mesjid dan MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah), dimana lantai 1 dan 2 telah selesai sedangkan lantai 3 dalam tahap pembangunan.

Disamping itu, mesjid ini juga memiliki tanah wakaf seluas 341 m² dengan Nomor 102 yang diterbitkan pada tanggal 16 September 1991 dimana awal tanah ini tempat ibadah (surau majelis zikir), dari awal penyerahan tanah wakaf tersebut, pengurus surau mejelis zikir menyerahkan sepenuhnya kepada pengurus mesjid Baitul Mukminin untuk dikelola dan dikembangkan

²Wawancara penulis dengan Bapak Drs. Abdul Haris, SH, MSi (Sekretaris Mesjid Baitul Mukminin) di Jl. Ababil tanggal 10 April 2011, jam 20.00-20.30 WIB.

sehingga tidak menghilangkan manfaat dari harta wakaf tersebut. Pada saat sekarang ini dibangun diatasnya 4 unit rumah yang disewakan perbulannya dan telah berjalan semenjak tahun 2009.

Pengembangan dari tanah ini menjadi mesjid dan rumah ini merupakan hasil dari swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah, jadi penulis juga berpendapat bahwa dimesjid ini juga terdapat wakaf benda tidak bergerak (tanah), dan wakaf bergerak (berupa uang yang telah dikumpulkan dari masyarakat dan pemerintah dan merupakan bagian dari *infaq fisabilillah*).

3. Mesjid Al-Khairat (Yayasan Amal Khairat) ³

Mesjid Al-Khairat yang terletak di jalan Mangga kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi merupakan mesjid yang dibawah naungan yayasan yang telah membangun sebuah mesjid yang berasal dari tanah wakaf. Yayasan ini secara struktural mempunyai tiga bidang antara lain, Pengurus mesjid, Bidang pendidikan, Bidang Organisasi dan Pembangunan, dimana pengelolaan tanah wakafnya diserahkan kepada masing-masing bidang.

Melihat kondisi mesjid yang begitu kecil, maka berdasarkan hasil musyawarah pengurus dan masyarakat telah sepakat untuk memindahkan mesjid tersebut kesamping kanan tanah wakaf. Dimana tanah tersebut dibeli berdasarkan dana dari masyarakat dengan pertimbangan dapat dibangun lebih besar lagi. Kedua tanah tersebut dipisahkan oleh gang.

³Wawancara penulis dengan Bapak H. Ise Pasaribu, (ketua 1 mesjid Al-khairat) di Jl. Mangga tanggal 2 April 2011, jam 09.30-10.00.

Lokasi lama bekas pembangunan mesjid Al-Khairat merupakan tanah wakaf dengan ukuran 250 m² yang saat ini dibangun 4 unit ruko. Seharusnya perubahan peruntukan harta wakaf dilaporkan. Menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf bahwa perubahan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia . minimal nazhir melaporkan kepada KUA Kecamatan Sukajadi, namun kenyataannya penulis belum menemukan nazhir melaporkan perubahan harta wakaf tersebut, tetapi perubahan harta wakaf itu merupakan hasil dari musyawarah jama'ah dan pengurus dan beberapa wakif juga terlibat.

Dana pengembangan tanah ini menjadi ruko berasal dari pinjaman dari salah satu jama'ah mesjid yang bernama H. Asnomel Sutan Kamaludin tepatnya pada tahun 2007, sehingga sekarang masih terhutang sebesar 30 juta dan insyaallah akan lunas pada cicilan berikutnya.

Selain dari mesjid sebagai tempat ibadah tersebut, yayasan tersebut memperuntukkan tanah wakaf tersebut dibidang pendidikan berupa MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah), dan TK (Taman Kanak-Kanak), dan berupa roko. Dari harta wakaf tersebut penulis memfokuskan pada harta wakaf yang diproduktifkan (berupa ruko), namun untuk MDA dan TK merupakan bagian dari wakaf langsung.

Semua harta wakaf yang ada di yayasan amal khairat terdiri dari wakaf benda tidak bergerak berupa tanah yang dipergunakan untuk MDA, TK dan

ruko, dan harta wakaf yang bergerak merupakan swadaya masyarakat dalam bentuk uang tunai untuk pembangunan mesjid.

4. Mesjid Dakwah⁴

Mesjid Dakwah terletak di Jalan Teratai Gg. Bunga No. 12 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Sukajadi merupakan sebuah mesjid yang berasal dari harta wakaf benda tidak bergerak berupa tanah wakaf dari bapak Buyung Ayo. Diatas tanah ini dibangunlah sebuah musholla dan berubah menjadi sebuah mesjid yang berlantai 2, dimana lantai 1 sebagai tempat Ibadah dan lantai 2 tempat MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah).

Disamping itu, mesjid ini juga mempunyai harta wakaf berupa benda bergerak dalam bentuk uang yang dipergunakan pembelian 3 unit rumah dengan harga 100 juta yang berasal dari swadaya masyarakat. Tetapi pada saat sekarang ini tinggal 2 rumah yang diproduktifkan dalam bentuk kontrakan dan satu lagi direnovasi untuk pelebaran mesjid dakwah tersebut.

Harta wakaf tersebut tidak hanya digunakan sebagai tempat fasilitas Ibadah (mesjid) melainkan juga disediakan tempat untuk pendidikan dan suatu usaha yang menghasilkan uang (produktif) baik berupa toko (mesjid Al-Khairat), kos-kosan (mesjid Al-Falah II), rumah sewa (mesjid Baitul Mukminin, kontrakan (mesjid Dakwah). Berdasarkan hasil tersebut, maka wakaf memiliki nilai potensi yang sangat baik untuk mensejahterakan rakyatnya. Kemudian rata-rata hasilnya untuk operasional MDA.

⁴ Wawancara penulis dengan Bapak H. Martinis, (ketua mesjid Dakwah) di Jl. Teratai tanggal 31 Maret 2011, jam 10.30-11.15.

B. Pelaksanaan Wakaf Produktif di Mesjid-Mesjid Kecamatan Sukajadi.

Berdasarkan periodisasi pelaksanaan pengelolaan wakaf di Indonesia kita seharusnya mulai meninggalkan periode semi profesional menuju pengelolaan wakaf profesional adalah lahirnya Undang-undang wakaf yakni No. 41 tahun 2004 dan diperjelas pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang wakaf.

Namun periode pelaksanaan pengelolaan wakaf profesional ini belum nampak pada pelaksanaan di mesjid-mesjid Kecamatan Sukajadi tetapi sudah hampir mengarah pada yang dimaksud hal ini perlu perjuangan untuk memberikan bekal atau ilmu dan pelatihan –pelatihan khusus kepada nazhir mesjid-mesjid dan yayasan tersebut dalam memanfaatkan harta wakaf agar lebih banyak bermanfaat lagi selain dari mesjid. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan pelaksanaan pengelolaan harta wakaf di mesjid-mesjid kecamatan Kecamatan Sukajadi berdasarkan beberapa asas yaitu asas pertanggung jawaban, asas profesionalisme manajemen, dan keadilan sosial.

Nazhir mempunyai peranan penting dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf agar mempunyai lebih bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan terwujud apabila seorang nazhir betul-betul bergerak dibidangnya dan paham tentang Undang-undang wakaf sehingga apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat umum tentang harta wakaf yang tidak dipergunakan dan dirawat bahkan jadi sengketa akan hilang.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dari keempat mesjid tersebut rata-rata pengelolaan dan pengembangan dari harta wakaf tersebut

merupakan sebuah pekerjaan sampingan (mesjid Baitul Mukminin, mesjid Al-khairat, dan mesjid Dakwah), namun walaupun demikian mereka juga bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dengan harapan mendapat ganjaran dan ridho dari Allah SWT, disamping itu para nazhir ini ada juga terlibat sebagai pengurus mesjid, diantaranya Bapak H. Hadimin, SH selain dari koordinator seksi dakwah, imam, dan anggota seksi pendidikan (mesjid Baitul Mukminin), Bapak Yusman selaku bendahara (mesjid Dakwah), berbeda dengan mesjid Al-khairat karena dibawah naungan yayasan maka nazhirnya dibawah bidang organisasi dan pembangunan lebih tepatnya pada seksi usaha yaitu Bapak Mardius. Dari ketiga nazhir tersebut hanya Bapak H. Hadimi yang mengetahui tentang UU perwakafan dengan mengatakan “ jika ada harta wakaf lain yang ada dimesjid tersebut akan mereka kembangkan dengan membangun sebuah yayasan “ hal ini menunjukkan bahwa Bapak tersebut paham akan manfaat dari harta wakaf tersebut.

Jika suatu pekerjaan itu memang betul-betul berdasarkan keahlian dan berada dalam satu bidang untuk mengurus tertentu, tentu hasilnya juga akan berbeda jika dikerjakan sebagai sampingan. Diantara keempat mesjid tersebut hanya mesjid A-Falah yang mempunyai seorang nazhir yang bekerja mengelola harta wakaf sebagai pekerjaan utama yaitu Bapak Drs. H. Jurianto yang telah diberikan kepercayaan untuk mengelola harta wakaf tersebut baik wakaf langsung maupun wakaf produktifnya (kos-kosan). Artinya selain nazhir dia juga terlibat sebagai sekretaris merangkap menjadi imam, dan kepala MDA. Disamping itu, ia juga mendapat imbalan atas usaha yang

dilakukakannya yaitu berupa Uang Rp 100.000, tempat tinggal bersama keluarga ditambah dengan honor guru MDA. Sedangkan ketiga nazhir lainnya karena bukan pekerjaan utama mereka cuma mengharapkan ridho Allah SWT, sedangkan hak nazhir telah diatur dalam UU No 41 tahun 2004 pasal 12 seorang nazhir mendapat imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebesar 10%.

Adapun hasil dari pengelolaan wakaf produktif pada mesjid-mesjid tersebut berbeda-beda karena bentuk dari wakaf produktif yang dimilikinya juga berbeda-beda diantaranya mesjid Al-Falah II memiliki 17 kamar kos untuk para pelajar dan mahasiswa dengan hasil Rp 2. 500.000 perbulannya, mesjid Baitul Mukminin memiliki 4 unit rumah sewaaan dengan hasil Rp 2.400.000 perbulannya, yayasan amal khairat (mesjid khairat) memiliki 4 toko yang dikontrakkan dengan hasil Rp 60.000.000 pertahunnya, sedangkan mesjid Dakwah memiliki 2 unit rumah kontrakan dengan hasil Rp 11.500.000 pertahunnya. Dari keempat mesjid tersebut hanya mesjid dakwah yang memanfaatkan hasil tersebut untuk dimasukkan ke dalam kas bendahara mesjid dan membantu operasional MDA jika dibutuhkan. Mesjid Al-Falah II digunakan untuk biya perawatan, honor guru MDA, dan nazhir, mesjid Baitul Mukminin digunakan untuk operasional MDA, sedangkan mesjid Al-khairat mempunyai niat untuk megalokasikannya kepada mesjid , operasional MDA dan kegiatan ibadah sosial lainnya.

Berdasarkan jenis usaha dan hasilnya tersebut, maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa harta wakaf produktif yang tumbuh dan berkembang

di mesjid-mesjid Kecamatan Sukajadi banyak dikelola oleh nazhir perseorangan yang bekerja secara sukarela melainkan usaha sampingan yang bersifat sosial atau sukarela, dan hasil wakaf produktifnya semuanya untuk sosial dan pendidikan. kemudian pelaksanaan pengelolaan harta wakaf produktif di mesjid-mesjid Kecamatan Sukajadi lebih banyak merupakan usaha yang sederhana, proses pengelolaan yang sederhana dengan resiko yang kecil. Hukum bisnis berlaku dimana resiko kecil akan mendatangkan keuntungan yang kecil, dan jika resiko besar, maka akan mendatangkan hasil yang besar.

Berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 11 menjelaskan bahwa nazhir mempunyai peran sebagai berikut :

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

Dari semu nazhir yang penulis teliti, ada nazhir yang telah melakukan pengadiministrasian tanah wakaf (langsung maupun produktif) dengan cara pembuatan sertifikat di BPN (Badan Pertanahan Nasional), namun pengadministrasian di kantor KUA dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf belum ada, nama pewakif, dan nilai harta ketika diwakafkan baik tanah maupun bangunan belum ada termasuk biodata nazhirnya dan laporan khusus mengenai harta wakaf produktif. Sedangkan ingatan serta umur manusia terbatas, dengan pengadministrasian dapat meminimalisir hilangnya data dan sejarah.

b. Mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Nazhir telah menjalankan tugas ini walaupun terdapat beberapa kasus nazhir tidak mengelola berdasarkan peruntukannya (tempat ibadah), namun hal ini terjadi melihat dari kondisi tanah wakaf itu sendiri yang tidak memungkinkan lagi sehingga terjadi perubahan peruntukan harta wakaf langsung menjadi harta wakaf produktif disamping itu perubahan tersebut telah disepakati oleh pengurus dan jama'ah. Menurut penulis, hal tersebut tidak mendatangkan mudharat bahkan lebih banyak manfaatnya, tujuan dan fungsinya tercapai.

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

Nazhir adalah jama'ah aktif, sehingga kredibilitas dan integritas pribadi masing-masing dapat dipercaya untuk mengawasi dan melindungi harta wakaf.

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Tidak ada satupun nazhir yang penulis teliti membuat laporan kepada Badan Wakaf Indonesia. Menurut penulis poin ini masih perlu waktu untuk dapat terealisasi. Karena sampai saat ini Badan Wakaf Indonesia tingkat Propinsi Riau maupun kecamatan tidak ada melainkan KUA (Kantor Urusan Agama).

Tidak ada satupun nazhir yang penulis teliti membuat laporan kepada Badan Wakaf Indonesia. Menurut penulis poin ini masih perlu untuk dapat terealisasi karena sampai saat ini Badan Wakaf Indonesia tingkat Propinsi maupun tingkat Kota Pekanbaru belum ada, yang ada di Kecamatan cuma KUA namun juga tidak dilaporkan.

C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Wakaf Produktif di Mesjid-Mesjid Kecamatan Sukajadi.

Undang – Undang dasar 1945 dan penjelasannya bahwa wakaf telah dijadikan sebagai media untuk memajukan kesejahteraan umum (sosial) berarti menjadikan wakaf sebagai media untuk menciptakan wakaf keadilan-ekonomi. pada dasarnya wakaf adalah “*economic corporation*”, sehingga wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf.

Harta wakaf produktif dapat menghasilkan pelayanan dan manfaat, seperti tempat shalat yang berupa mesjid, manfaat tempat tidur orang sakit atau tempat duduk untuk kegiatan belajar siswa di sekolah. Harta wakaf ini juga bisa menghasilkan barang atau pelayanan lainnya yang dapat dijual kepada para pemakai dan hasil bersihnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Wakaf Islam adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat yang akan datang.

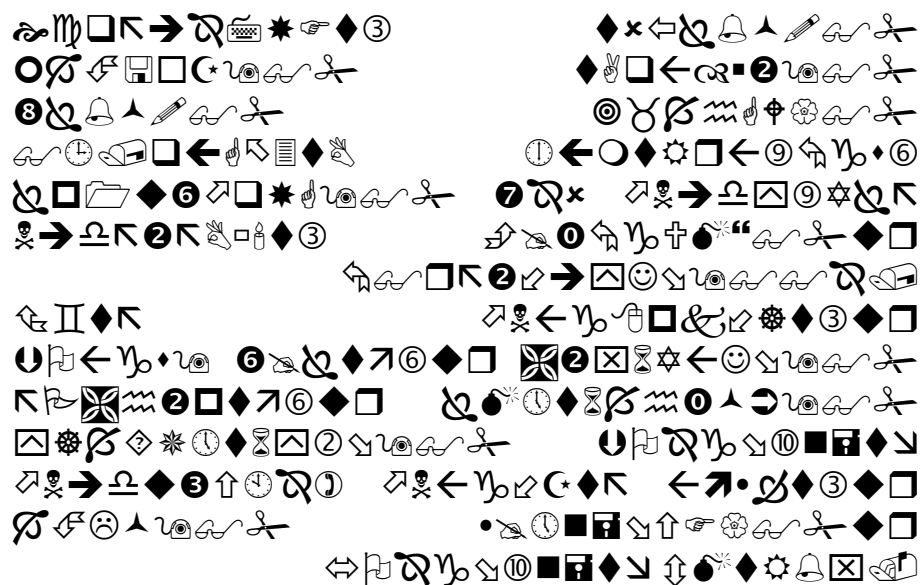
Dalam sistem ekonomi Islam, kata “produksi” merupakan salah satu kunci terpenting, karena dari konsep dan gagasan produksi ditekankan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai kegiatan ekonomi dalam sisem ekonomi

Islam adalah untuk kemaslahatan individu, dan kemaslahatan masyarakat secara berimbang. Dengan kata lain, bahwa prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi dengan bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari hanya barang-barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber daya secara maksimum, baik manusia maupun benda⁵.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam produksi yang dikemukakan oleh Muhammad al-Mubarak adalah⁶ :

1. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syari'ah.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-'araf : 157



157. (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Umami yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan

⁵ Muhammad Said, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan*, (Pekanbaru ; Suska Press, 2008), h. 62.

⁶ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru, : Alaf Riau Graha UNRI PRESS, 2007), h. 66.

bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka⁷.

2. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezholiman, seperti riba.
3. Segala bentuk penimbunan (ikhtikar) terhadap barang-barang kebutuhan bagi masyarakat, adalah dilarang sebagai kebutuhan syari'ah terhadap konsumen dari masyarakat.

Dalam penelitian yang penulis lakukan terhadap mesjid-mesjid yang menjalankan wakaf produktif rata-rata harta wakaf yang semula konsumtif diubah menjadi wakaf yang produktif dengan tidak menghilangkan fungsi dan tujuan wakaf semula (mesjid) dalam bentuk kos-kosan, rumah kontrakan dan sewaan dan ruko yang disewakan. Dimana dalam konsep fiqh mu'amalah sewa disebut dengan istilah Ijarah.

Ijarah ialah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri⁸.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 233⁹



⁷ Depag, *Al-qur'an dan Terjemahan (Syamil Qur'an)*, (Bandung : PT Syaamil Cipta Media, th) h. 170.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani , 2001) h. 117.

⁹ Depag, *Al-qur'an dan Terjemahan (Syamil Qur'an)*, (Bandung : PT Syaamil Cipta Media, th) h . 37.

Dapat penulis simpulkan bahwa tinjauan ekonomi Islam terhadap wakaf produktif di mesjid-mesjid Kecamatan Sukajadi tidak bertentang dengan syari'at Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Potensi wakaf produktif di Mesjid-mesjid kecamatan Sukajadi dapat berupa Kos-kosan, Rumah kontrakan dan sewaan dan berupa ruko yang dikontrakkan dan hanya sedikit yang baru menjalankan terutama mesjid Al-Falah II, Al-Khairat, Baitul Mukminin, dan Dakwah, sedangkan mesjid lainnya mempunyai dalam bentuk wakaf langsung. Hasil dari pengelolaan wakaf produktif rata-rata diperuntukkan untuk operasional MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah).
2. Pelaksanaan wakaf produktif di mesjid-mesjid Kecamatan Sukajadi masih bersifat sederhana dan tradisional. Hal ini dapat dilihat dari :
 - a. Harta wakaf produktif yang tumbuh dan berkembang di Mesjid-mesjid Kecamatan Sukajadi yang dikelola oleh nazhir berpegang teguh pada usaha yang kaku, kurang inovasi, dan merupakan pekerjaan sampingan yang bersifat sosial atau sukarela.
 - b. Harta wakaf produktif yang tumbuh dan berkembang merupakan usaha yang sederhana dengan resiko kecil. Hukum bisnis berlaku

dimana resiko kecil mendatangkan untung kecil dan resiko besar akan mendatangkan untung besar .

3. Tinjauan ekonomi Islam terhadap wakaf produktif di mesjid-mesjid Kecamatan Sukajadi tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Hal ini dapat dilihat dari dari usaha yang dijalankan tidak ada yang bertentangan dengan syari'at Islam dan dalam pelaksanaannya berupa penyewaan harta wakaf produktif di mesjid-mesjid Kecamatan Sukajadi yang penulis lakukan tidak ditemukannya adanya unsur riba atas keterlambatan pembayarannya, jikapun ada keterlambatan atas pembayaran tersebut nazhir memberikan waktu dan kesempatan untuk membayarnya,

B. Saran

Dilihat dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menyarankan beberapa hal diantaranya :

1. Memilih nazhir yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan dan bekerja secara profesional dan kreatif mengembangkan wakaf baru.
2. Nazhir sebaiknya mendapatkan 10% dari keuntungan pengelolaan wakaf seperti yang tercantum dalam UU No. 41 Tahun 2004, atau 10% dari hasil tersebut digunakan untuk meningkatkan kompetensi nazhir dengan mengikuti nazhir pada pelatihan dan kursus mengenai pengelolaan investasi, *enterpreneurship*, pelatihan

manajemen dan membuat laporan keuangan serta kursus singkat penggunaan teknologi seperti komputer.

3. Kementerian Agama diharapkan agar lebih mensosialisasikan UU No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang wakaf kepada masyarakat dan para nazhir yang ada di mesjid-mesjid Kecamatan Sukajadi pada khususnya, dan para nazhir pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Alabi, Adijani , *Perwakafan Tanah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1997.
- Al-Abani, M. Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Mulim*. Gema Insani : Jakarta, 2005
- Antonio, Syafi'i, Muhammad. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani: Jakarta, 2001.
- Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan* PT. Syamil Cipta Media : Bandung, 2005.
- _____, *Nazhir Profesional dan Amanah*, direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji :TP, 2005.
- _____, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*. 2007
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*. Depag RI : Jakarta, 2007
- _____, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Pruduktif Strategis di Indonesia*, Depag : Jakarta, 2007.
- _____, *Pedoman Pengolaan Wakaf Tunai*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat islam: Jakarta, 2007.
- _____, *Paradigma Baru Wakaf*, Depag : Jakarta, 2007
- Djunaidi, Ahmad, dkk , *Menuju Era Wakaf Produktif*, Mumtaz Publishing : Jakarta, 2007.
- Ensiklopedi Indonesia, *Departemen Pendidikan dan kebudayaan*, Pakhi Pamungkas : Jakarta, 1997.
- Ensiklopedi Islam 7, TAAw-ZUNN, Ichtiar Baru Van Hoeve.
- <http://nurkholis.77.stff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-Indonesia>. Akses Jum'at, 25 Maretl 2011
- <http://rol.republika.co.id>. akses Kamis, 15 April 2011
- <http://wennyrad.multiply.com/journal/item/134>, Tanggal 07 Januari 2011

<http://abihafiz.wordpress.com>Akses Jum'at, 25 Maretl 2011.

Mawardi, *Ekonomi Islam*, Alaf Riau Graha UNRI PRESS : Pekanbaru, 2007.

Megawati, Devi. *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru*, Pekanbaru, 2010.

Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media : Bandung, 2008

Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, Darus Sunnah Press : Jakarta Timur, 2007.

Tima Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*. Gita Media Press, Surabaya, 2006.

_____, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta, 1990.

Sari, Kartika, Elsi, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Garsindo : Jakarta, 2006

Shalih al-'Usaimain, Syaikh Muhammad, bin, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*. Pustaka Imam Syafi'i : Jakarta, 2005.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Prenada Media Group ; Jakarta, 2010.

Suhendi, hendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2007

**DAFTAR WAWANCARA
UNTUK WAKIF**

**JUDUL : POTENSI WAKAF PRODUKTIF
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
PADA MESJID.....**

Nama Wakif :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Jabatan dalam kepengurusan mesjid :

Benda yang diwakafkan :

Tahun mewakafkan :

Perkiraan harga ketika dimawakafkan:

Apabila berupa tanah berapa luasnya :

Jumlah bangunan yang ada diatasnya:

Alamat harta yang di wakafkan :

A. Azaz Keabadian Manfaat

1. Apakah harta wakaf berupa benda bergerak atau tidak bergerak ?
2. Apakah manfaat benda yang di wakafkan masih ada untuk jangka waktu yang lama?
3. Apakah benda yang diwakafkan hanya untuk fasilitas ibadah saja ?
4. Apakah benda yang di wakafkan digunakan untuk kepentingan pendidikan ?
5. Apakah benda yang di wakafkan digunakan untuk usaha yang menghasilkan nilai uang ?
6. Apakah hasil usaha harta wakaf digunakan untuk modal bergulir ?
7. Apakah harta wakaf dijadikan Ruko?
8. Apakah harta wakaf dijadikan Kos-kosan ?
9. Apakah harta wakaf dijadikan kontrakan ?

10. Apakah harta wakaf dijadikan Sewa Rumah ?

B. Azaz Pertanggung Jawaban

1. Kepada siapakah Nazhir bertanggung jawab? Kepada wakif atau kepada pengurus.
2. Apakah Bapak / Ibu mengetahui tentang pembagian hasil antara Nazhir dan mesjid penerima wakaf ?
3. Berapa pembagian hasil diantara Nazhir dan mesjid penerima wakaf ?
4. Apakah wakif terlibat sebagai pengurus ?
5. Apakah wakif masih ikut campur dalam manajemen ?
6. Apakah perubahan peruntukan harta wakaf telah disetujui oleh Wakif ?
7. Apakah perubahan peruntukan harta wakaf telah disetujui oleh pengurus mesjid ?
8. Apakah perubahan peruntukan harta wakaf telah dilaporkan ke KUA ?

C. Azaz Profesionalisme Manajemen

1. Apakah wakaf produktif tersebut dikelola oleh Yayasan ?
2. Apakah wakaf produktif tersebut dikelola oleh perorangan ?
3. Berapa lama waktu kepengurusan kepanitiaan pengelolaan harta wakaf ?
4. Apakah pengurus dipilih berdasarkan pendidikan ?
5. Apakah pengurus dipilih berdasarkan kecakapan ?
6. Apakah pengurus dipilih berdasarkan kekeluargaan ?
7. Apakah pengurus dipilih berdasarkan pengalaman ?

D. Azaz Keadilan Sosial

1. Apakah pemilihan terhadap nazhir berdasarkan keadilan ?
2. Apakah pemilihan terhadap nazhir untuk tujuan mengurangi kemiskinan ?
3. Apakah pemilihan terhadap nazhir berdasarkan pendidikan ?
4. Apakah pemilihan terhadap nazhir berdasarkan kecakapan ?
5. Apakah pemilihan terhadap nazhir berdasarkan kekeluargaan ?
6. Apakah pemilihan terhadap nazhir berdasarkan pengalaman ?

**DAFTAR WAWANCARA
UNTUK PENGURUS MESJID**

.....

**JUDUL : POTENSI WAKAF PRODUKTIF
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Nama Pengurus mesjid :
Jabatan dalam kepengurusan mesjid :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Benda yang diwakafkan :

A. Azaz Keabadian Manfaat

1. Apakah harta wakaf berupa benda bergerak atau tidak bergerak ?
2. Apakah manfaat benda yang di wakafkan masih ada untuk jangka waktu yang lama?
3. Apakah benda yang diwakafkan hanya untuk fasilitas ibadah saja ?
4. Apakah benda yang di wakafkan digunakan untuk kepentingan pendidikan ?
5. Apakah benda yang di wakafkan digunakan untuk usaha yang menghasilkan nilai uang ?
6. Apakah hasil usaha harta wakaf digunakan untuk modal bergulir ?
7. Apakah harta wakaf dijadikan Ruko?
8. Apakah harta wakaf dijadikan Kos-kosan ?
9. Apakah harta wakaf dijadikan kontrakan ?
10. Apakah harta wakaf dijadikan Sewa Rumah ?

B. Azaz Pertanggung Jawaban

1. Apakah pengelolaan harta wakaf itu pekerjaan utama atau sampingan ?
2. Berapa hasil pengelolaan harta wakaf perbulan/pertahun ?

3. Apakah Nazhir mendapatkan imbalan dalam mengelola harta wakaf ?
4. Jika ia berapa nilai imbalan / honor Nazhir Rp.....
5. Berapa pembagian hasil untuk mesjid penerima wakaf ?
6. Apakah nazhir mengetahui tentang UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf ?
7. Kepada siapakah nazir bertanggung jawab ?
8. Apakah wakif terlibat sebagai pengurus pengelola harta wakaf ?
9. Apakah perubahan peruntukan harta wakaf telah disetujui oleh pengurus mesjid ?
10. Apakah perubahan peruntukan harta wakaf telah disetujui oleh Wakif ?
11. Apakah perubahan peruntukan harta wakaf telah dilaporkan ke KUA ?

C. Azaz Profesionalisme Manajemen

1. Apakah pengurus mesjid terlibat dalam pengelolaan harta wakaf ?
2. Apakah wakaf produktif tersebut dikelola oleh Yayasan ?
3. Apakah wakaf produktif tersebut dikelola oleh perorangan ?
4. Berapa lama waktu kepengurusan kepanitiaan pengelolaan harta wakaf ?
5. Apakah pengurus dipilih berdasarkan pendidikan ?
6. Apakah pengurus dipilih berdasarkan kecakapan ?
7. Apakah pengurus dipilih berdasarkan kekeluargaan ?
8. Apakah pengurus dipilih berdasarkan pengalaman ?

D. Azaz Keadilan Sosial

1. Apakah pemilihan terhadap nazhir berdasarkan keadilan ?
2. Apakah pemilihan terhadap nazhir untuk tujuan mengurangi kemiskinan ?
3. Apakah pemilihan terhadap nazhir berdasarkan pendidikan ?
4. Apakah pemilihan terhadap nazhir berdasarkan kecakapan ?
5. Apakah pemilihan terhadap nazhir berdasarkan kekeluargaan ?
6. Apakah pemilihan terhadap nazhir berdasarkan pengalaman ?

**DAFTAR WAWANCARA
UNTUK NAZIR**

**JUDUL : POTENSI WAKAF PRODUKTIF
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
PADA MESJID.....**

Nama Nazir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Jabatan dalam kepengurusan mesjid :
Benda yang di kelola :

A. Azaz Pertanggung Jawaban

1. Apakah pengelolaan harta wakaf itu pekerjaan utama atau sampingan ?
2. Berapa hasil pengelolaan harta wakaf perbulan/pertahun ?
3. Apakah Nazhir mendapatkan imbalan dalam mengelola harta wakaf ?
4. Jika ia berapa nilai imbalan / honor Nazhir Rp.....
5. Berapa pembagian hasil untuk mesjid penerima wakaf ?
6. Apakah nazhir mengetahui tentang UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf ?
7. Kepada siapakah nazir bertanggung jawab ?
8. Apakah wakif terlibat sebagai pengurus pengelola harta wakaf ?
9. Apakah perubahan peruntukan harta wakaf telah disetujui oleh Wakif ?
10. Apakah perubahan peruntukan harta wakaf telah disetujui oleh pengurus mesjid ?
11. Apakah perubahan peruntukan harta wakaf telah dilaporkan ke KUA ?

B. Azaz Profesionalisme Manajemen

1. Apakah wakaf tersebut dikelola oleh Yayasan ?
2. Apakah wakaf tersebut dikelola oleh perorangan ?
3. Berapa lama waktu kepengurusan kepanitiaan pengelolaan harta wakaf ?

4. Apakah pengurus dipilih berdasarkan pendidikan ?
5. Apakah pengurus dipilih berdasarkan kecakapan ?
6. Apakah pengurus dipilih berdasarkan kekeluargaan ?
7. Apakah pengurus dipilih berdasarkan pengalaman ?

C. Azaz Keadilan Sosial

1. Apakah pemilihan terhadap nazhir berdasarkan keadilan ?
2. Apakah pemilihan terhadap nazhir untuk tujuan mengurangi kemiskinan ?
3. Apakah pemilihan terhadap nazhir berdasarkan pendidikan ?
4. Apakah pemilihan terhadap nazhir berdasarkan kecakapan ?
5. Apakah pemilihan terhadap nazhir berdasarkan kekeluargaan ?
6. Apakah pemilihan terhadap nazhir berdasarkan pengalaman ?